

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian indikator makro sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,89	76,71	1,081
2	Angka Kemiskinan	7,41	7,24	-2,294
3	Angka Pengangguran	3,21	3,25	1,246
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,21	2,19	-0,095
5	Pendapatan Per Kapita	132.340.000	138.700.000	4.806
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,379	0,350	-7.652

Sumber data : BPS Kabupaten Kudus

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari capaian indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Pendidikan	Pendidikan PAUD				
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	310	Unit	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	370	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidika	484	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	2.097	Orang	Disdikpora
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	2.097	Orang	Disdikpora
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1187	Orang	Disdikpora
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	357	Orang	Disdikpora
		Pendidikan Dasar				
		1	Jumlah SD Negeri Terakreditasi	397	Unit	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	73.127	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.395	Orang	Disdikpora
		5	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.478	Orang	Disdikpora

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	506	Orang	Disdikpora
		7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	776	Orang	Disdikpora
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1563	Orang	Disdikpora
		9	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	365	Orang	Disdikpora
		10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	336	Orang	Disdikpora
		11	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	204	Orang	Disdikpora
			Pendidikan Menengah Pertama			
		1	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	27	Unit	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	69.443	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.555	Orang	Disdikpora
		5	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.212	Orang	Disdikpora
		6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	215	Orang	Disdikpora

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	266	Orang	Disdikpora
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	716	Orang	Disdikpora
		9	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	42	Orang	Disdikpora
		10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	184	Orang	Disdikpora
Pendidikan Kesetaraan						
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	10	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	230	Orang	Disdikpora
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	230	Orang	Disdikpora
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	152	Orang	Disdikpora
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat	0	Orang	Disdikpora

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
			pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	18	Orang	Disdikpora
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan				
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	8	Unit	Dinas Kesehatan
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi				
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	18	Unit	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13.381		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	3.141	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13.381		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan,persalinan sesuai standar	3.208	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13.306		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	3.208	Orang	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	68.881		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3176		Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	126.115		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	3.214	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	575.509		Dinas Kesehatan

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.241	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	94.958		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.241	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	236.225		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.241	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18.329		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.241	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.166		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.285	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12.366		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.535	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	19.874		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.295	Orang	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir				
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	610,16	Ha	Dinas PUPR
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	17.702	M	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)	Nihil	Ha	Dinas PUPR
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	Tidak ada wilayah pantai	M	Dinas PUPR
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	Tidak ada	Jumlah	Dinas PUPR
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota/Kota				
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	Tidak ada	Ha	Dinas PUPR
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)	Tidak ada	Ha	Dinas PUPR
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	Tidak ada	Jumlah	Dinas PUPR
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	90,28	%	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	90,28	%	Dinas PUPR
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	90,02	%	Dinas PUPR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				
		1	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kota	1 Dok	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kota	1 Dok	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota penyelenggaran SPAM	Tidak ada	BUMD/UPTD	Dinas PUPR
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak ada	Izin	Dinas PUPR
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak ada	Kerja sama	Dinas PUPR
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	2.056	Rumah	Dinas PUPR
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	1.356	Rumah	Dinas PUPR
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	3.812	Rumah	Dinas PUPR
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	1.336	Rumah	Dinas PUPR
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	1.336	Rumah	Dinas PUPR
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1.356	Rumah	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	31,18	%	Dinas PUPR
		8	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	15,66	%	Dinas PUPR
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	23,55	%	Dinas PUPR
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	87,90	%	Dinas PUPR
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	54,96	%	Dinas PUPR
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	9,54	%	Dinas PUPR
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	87,90	%	Dinas PUPR
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	16,11	%	Dinas PUPR
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota						
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	%	Dinas PUPR
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting	683	Izin	Dinas PUPR
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	1	Bangunan	Dinas PUPR
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota	0	Bangunan	Dinas PUPR
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kota	3.714	Bangunan	Dinas PUPR
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat	152	Bangunan	Dinas PUPR
Rasio kemantapan jalan						
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/ kota	639.262	M	Dinas PUPR
		2	Panjang jalan yang dibangun	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		3	Panjang jembatan yg dibangun	Tidak ada	M	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan	26.592,90	M	Dinas PUPR
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	44,8	M	Dinas PUPR
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	61.214,83	M	Dinas PUPR
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		8	Panjang jalan yang dipelihara	11.109,00	M	Dinas PUPR
		9	Panjang jembatan yang dipelihara	197	M	Dinas PUPR
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli				
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kota	0	Orang	Dinas PUPR
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kota	177	Orang	Dinas PUPR
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	177	Orang	Dinas PUPR
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBD kabupaten/kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBN	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kab/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	66	Badan Usaha	Dinas PUPR
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/ kota	Tidak ada	Badan Usaha	Dinas PUPR
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota	Tidak ada	Badan Usaha	Dinas PUPR
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota	Tidak ada	Badan Usaha	Dinas PUPR
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	izin	Dinas PUPR
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Pengawasan	Dinas PUPR
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Kecelakaan Konstruksi	Dinas PUPR
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Pengawasan	Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten				
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	22.433,00	Unit	Dinas PKPLH
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	32	Unit	Dinas PKPLH
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	128	Orang	Dinas PKPLH
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	1	Unit	Dinas PKPLH
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Nihil	Unit	Dinas PKPLH

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	NIHIL	Unit	Dinas PKPLH
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	99	Unit	Dinas PKPLH
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	3	Orang	Dinas PKPLH
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	NIHIL	Ha	Dinas PKPLH
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten				
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	NIHIL	RT	Dinas PKPLH
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	NIHIL	RT	Dinas PKPLH
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	NIHIL	RT	Dinas PKPLH
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	NIHIL	RT	Dinas PKPLH
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	NIHIL	RT	Dinas PKPLH
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	NIHIL	Ha	Dinas PKPLH
		Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani				
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha	145,40	Ha	Dinas PKPLH
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	409	Unit	Dinas PKPLH
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	136,814	Ha	Dinas PKPLH

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)				
		1	Jumlah rumah di kab/kota	247.595	Rumah	Dinas PKPLH
		2	Jumlah unit PK RTLH	409	Rumah	Dinas PKPLH
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	6.365	Rumah	Dinas PKPLH
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	7.428	Rumah	Dinas PKPLH
		5	Rasio rumah dan KK	1,18	%	Dinas PKPLH
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	881		Dinas PKPLH
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	23	Perumahan	Dinas PKPLH
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	6.137	Rumah	Dinas PKPLH
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	6.137	Rumah	Dinas PKPLH
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi(on site / off site)	6.137	Rumah	Dinas PKPLH
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	12	Perumahan	Dinas PKPLH
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	6.137	Rumah	Dinas PKPLH
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	20	Pengembang	Dinas PKPLH
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	20	Pengembang	Dinas PKPLH
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Nihil	Pengembang	Dinas PKPLH
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani	510	Jumlah	Satpol PP
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4.244	Orang	Satpol PP
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	44	Perda& Perkada	Satpol PP
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	Orang	Satpol PP
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	10	SOP	Satpol PP
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	1	Ada	Satpol PP

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	%	BPBD
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	%	BPBD
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100	%	BPBD
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100	%	BPBD
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100	%	BPBD
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	%	BPBD
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	%	BPBD
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	%	BPBD
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	%	BPBD
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	%	BPBD
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota	88	Layanan	Satpol PP

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Nihil	Pos	Satpol PP
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Nihil	Orang	Satpol PP
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Nihil	Pos	Satpol PP
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	3	Sarpras	Satpol PP
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	31	Orang	Satpol PP
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Nihil	Orang	Satpol PP
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	1	Keg	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
		1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	4	layanan	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Untuk Masuk Dalam Data Terpadu FM dan OTM	37	orang	DinsosP3A P2KB
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat Yang Dibentuk	1	tim	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Dijangkau	1121	orang	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki	1 unit mobil rescue	unit	DinsosP3A P2KB
		6	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Permakanaan Sesuai Standar Gizi	792	Orang	DinsosP3A P2KB
		7	Jumlah Rumah Singgah/ Shelter/ Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki Sesuai Standar	1	unit	DinsosP3A P2KB
		8	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Sandang	53	Orang	DinsosP3A P2KB
		9	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Alat Bantu	64	Orang	DinsosP3A P2KB
		10	Jumlah Alat Bantu Yang Tersedia di Rumah Singgah/ Shelter	1 kursi roda 2 kruk	unit	DinsosP3A P2KB
		11	Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan Yang Tersedia	1	Paket	DinsosP3A P2KB
		12	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Paket Perbekalan Kesehatan	5	Orang	DinsosP3A P2KB
		13	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Disediakan di Rumah Singgah	-		DinsosP3A P2KB
		14	Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan	1 orang Peksos 9 orang TKSK 77 orang PKH 23 orang Tagana	Orang	DinsosP3A P2KB
		15	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial Sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	198	Orang	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		16	Jumlah Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat	198 keluarga		DinsosP3A P2KB
		17	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	10	orang	DinsosP3A P2KB
		18	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20	orang	DinsosP3A P2KB
		19	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	5	orang	DinsosP3A P2KB
		20	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Direunifikasi dg Keluarga	5	Orang	DinsosP3A P2KB
		21	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Dirujuk	27	Orang	DinsosP3A P2KB
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten				
		1	Jumlah korban bencana yg mendapatkan makanan	3.239	Orang	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	80	Orang	DinsosP3A P2KB
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	132 desa/kel	Penampungan	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	20	Paket	DinsosP3A P2KB
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	100	Orang	DinsosP3A P2KB
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	110 org : 1 orang Peksos 9 orang TKSK 23 orang Tagana 77 orang PKH	Orang	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
7	Tenaga Kerja	Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja				
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	ada	Ada/Tidak	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	99,91	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	5	Perusahaan	Disnaker perinkop UKM
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi				
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	78,31	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	3,33	%	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	17,07	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Jumah penganggur yang dilatih	2.175	orang	Disnaker perinkop UKM
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	%	Disnaker perinkop UKM
		8	Persentase penyerapan lulusan	64,01	%	Disnaker perinkop UKM
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	100	%	Disnaker perinkop UKM
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang	93,95	%	Disnaker perinkop UKM
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	4	Pelatihan	Disnaker perinkop UKM
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Data tingkat produktivitas total	0,97	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	65,78	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	100,00	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Konfederasi SPISB : 1 Federasi SPISB : 6 SPISB di perusahaan : 70 SP/SB diluar perusahaan : 107 Anggota SP/SB di Perusahaan: 79.482	SP/SB	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	100,00	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,73	%	Disnaker perinkop UKM
		7	Jumlah Mogok Kerja	0	Mogok	Disnaker perinkop UKM
		8	Jumlah Penutupa Perusahaan	0	Perusahaan	Disnaker perinkop UKM
		9	Jumlah Perselisihan Kepentingan	0	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		10	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) Perusahaan	13	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		11	Jumlah Perselisihan PHK	54	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		12	Jumlah Pekerja / Buruh yang Ter-PHK	41	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		13	Jumlah Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perundingan Bipartite	1	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/ Kota yang Diberdayakan	1	LKS	Disnaker perinkop UKM
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	69,23	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kab/kab dalam 1 (satu) daerah kab				
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab	3.095	Lowongan Kerja	Disnaker perinkop UKM
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	3.831	Orang	Disnaker perinkop UKM
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab	26	BKK	Disnaker perinkop UKM
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kota	94	Orang	Disnaker perinkop UKM
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	8	Orang	Disnaker perinkop UKM
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab	0	Lembaga	Disnaker perinkop UKM
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab	264	Perjanjian	Disnaker perinkop UKM
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	2.904	orang	Disnaker perinkop UKM
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	281	Orang	Disnaker perinkop UKM
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	281	Orang	Disnaker perinkop UKM
		11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Fasilitas Kepulangan	100	%	Disnaker perinkop UKM
		12	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Pendidikan & Pelatihan Kerja	93,95	%	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan Keluarganya	100,00	%	Disnaker perinkop UKM
		14	Jumlah Layanan Terpadu satu Atap (LTSA) Yang Dibentuk (layanan TKI / PMI)	50,00	%	Disnaker perinkop UKM
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
		1	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab Yang Telah Dilatih PUG	34 OPD 27 Desa	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah Program PUG di Pemda yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kab	24	Prog/ Keg	DinsosP3A P2KB
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten				
		1	Jumlah Media Massa Yang Pernah Berkerjasama Untuk Melakukan "KIE" Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	5	Media Massa	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Telah Memiliki SPM	13	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		3	Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani	100	%	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Pelatihan	6	lembaga	DinsosP3A P2KB
		5	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan/ Fasilitas Oleh Pemkab/Kota (APBD Kab)	2	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak				
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan	3	organisa si	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kota yang sudah dilatih	4	Orang	DinsosP3A P2KB
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemkab	2 JPPA dan forum anak	Lemba ga	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	tdk ada	Kebijakan/Program	DinsosP3A P2KB
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	%	DinsosP3A P2KB
9	Pangan	Persentase Cadangan Pangan				
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	18	Ada/ Tidak	Dispartan pangan
		2	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	25.250	Ada/ Tidak	Dispartan pangan
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dispartan pangan
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dispartan pangan
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Ada/ Tidak	Dispartan pangan
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	18	Ada/ Tidak	Dispartan pangan
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dispartan pangan
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	10	Ada/ Tidak	Dispartan pangan
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan oleh Bupati	100	%	Dinas PUPR
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	%	Dinas PUPR
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	tidak ada		Dinas PUPR
		4	Dokumen Izin membuka tanah	tidak ada		Dinas PUPR
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kab	tidak ada		Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten				
		1	Hasil Perhitungan kota terhadap :			Dinas PKPLH
			a) Indeks Kualitas Air,(IKA)	52,67		Dinas PKPLH
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)	81,92		Dinas PKPLH
			c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	35,72		Dinas PKPLH
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten				
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten	84,63	%	Dinas PKPLH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten				
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	96,55	%	Dinas PKPLH
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	0,0032	%	Dinas PKPLH
		3	Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH Yang Berada di Daerah Kabupaten	0	%	Dinas PKPLH
4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	%	Dinas PKPLH		
5	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani	100,00	%	Dinas PKPLH		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik				
		1	Penerbitan akta perkawinan	100	%	Dinas Dukcapil
		2	Penerbitan akta perceraian	100	%	Dinas Dukcapil
		3	Penerbitan akta kematian	100	%	Dinas Dukcapil
	4	Penyajian data kependudukan	150	%	Dinas Dukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal				
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	Desa	Dinas PMD

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	Desa	Dinas PMD
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	-	Lemba ga	Dinas PMD
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-	Desa	Dinas PMD
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri						
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	113	Desa	Dinas PMD
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	4	Desa	Dinas PMD
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	5719	Lemba ga	Dinas PMD
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	113	Desa	Dinas PMD
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR				
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada	Ada/ Tidak	DinsosP3A P2KB
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20-25	Nilai Tengah	DinsosP3A P2KB
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	242	orang	DinsosP3A P2KB
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	4,78	%	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	7	Stakeholder	DinsosP3A P2KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	%	DinsosP3A P2KB
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,19	%	DinsosP3A P2KB
		3	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	21	kampung KB	DinsosP3A P2KB
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	39,54	%	DinsosP3A P2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)				
		1	Persentase kesertaan KB di kab dgn kesertaan rendah	43,94	%	DinsosP3A P2KB
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	59,17	%	DinsosP3A P2KB
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kota				
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	200	%	Dishub
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	0,68	%	Dishub
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	78,30	%	Dishub
		V/C Ratio di Jalan kota				
			Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten aatau kota	91,93	%	Dinas Perhubungan
19	Komunikasi dan Informatika	: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dgn memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ada	Ada/ Tidak	Dinas Kominfo
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi						
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	5,58	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	93,94	%	Dinas Kominfo
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	%	Dinas Kominfo
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	69,64	%	Dinas Kominfo
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	12,82	%	Dinas Kominfo
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	64,44	%	Dinas Kominfo
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	36,75	%	Dinas Kominfo
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	%	Dinas Kominfo

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	%	Dinas Kominfo
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	%	Dinas Kominfo
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	%	Dinas Kominfo
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	75,7	%	Dinas Kominfo
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ada	Ada/tidak	Dinas Kominfo
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah kabupaten				
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabuapten/ kota	100	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	%	Dinas Kominfo
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	%	Dinas Kominfo
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas				
		1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	100	%	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	%	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	84,31	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,82	%	Disnaker perinkop UKM
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	77,85	%	Disnaker perinkop UKM
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	60,13	%	Disnaker perinkop UKM
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	%	Disnaker perinkop UKM
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/kota	60,13	%	Disnaker perinkop UKM
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/kota	60,13	%	Disnaker perinkop UKM
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/ kota	92,41	%	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota	60,13	%	Disnaker perinkop UKM
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha				
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	3,52	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	79,42	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	2,57	%	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,77	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	4,16	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	5,49	%	Disnaker perinkop UKM
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	4,51	%	Disnaker perinkop UKM
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten				
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	3,034	Ada/ Tidak	Dinas PMPTSP
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PMPTSP
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Jumlah Laporan	Dinas PMPTSP
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	Jumlah Kegiatan	Dinas PMPTSP
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	1	Jumlah Kegiatan	Dinas PMPTSP
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Jumlah Kegiatan	Dinas PMPTSP
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	3024 perizinan 156 non perizinan	Jumlah Konsultasi	Dinas PMPTSP

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	14.459	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	Dinas PMPTSP
		9	Laporan realisasi penanaman modal	1.693.083.360.000	(Rupiah)	Dinas PMPTSP
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kota serta kabupaten/kota	22		Dinas PMPTSP
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	282	Perusahaan	Dinas PMPTSP
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten	19	Ada/Tidak	Dinas PMPTSP
19	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	262	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Orang	Disdikpora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	101	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	60	Orang	Disdikpora
		Peningkatan Prestasi Olahraga				
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	130	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	8	Event	Disdikpora
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
		1	Tersedianya buku profil daerah	ada	Ada/tidak	Dinas Kominfo
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	6	Jumlah Survey	Dinas Kominfo
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	10	Jml kompilasi	Dinas Kominfo
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1	Jumlah Survey	Dinas Kominfo
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	2	Jumlah Kompilasi	Dinas Kominfo

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100	%	Dinas Kominfo
		7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100	%	Dinas Kominfo
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah				
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan	0	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen	81,11	%	Dinas Kominfo
		3	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	6,67	%	Dinas Kominfo
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS)	84,85	%	Dinas Kominfo
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya				
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	110	Obyek	Disbudpar
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	4	Obyek	Disbudpar
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	1	Obyek	Disbudpar
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	Orang	Disbudpar
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	26	Cagar Budaya	Disbudpar
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	296	Cagar Budaya	Disbudpar

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	0	Cagar Budaya	Disbudpar
		8	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	3	Cagar Budaya	Disbudpar
		9	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	103	Cagar Budaya	Disbudpar
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	520	Koleksi	Disbudpar
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	79.859	Orang	Disbudpar
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			Disbudpar
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Tim	Disbudpar
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kota	1	Tim	Disbudpar
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Tim	Disbudpar
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	41	Orang	Disbudpar
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	2	Orang	Disbudpar
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	12	Unit	Disbudpar
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	24	Kegiatan	Disbudpar
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	182,05		Dinas Arpus
			Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	14,15	%	Dinas Arpus
			Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,06	%	Dinas Arpus
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	5,66	%	Dinas Arpus

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	160	kali	Dinas Arpus
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	1	Naskah Kuno	Dinas Arpus
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Naskah Kuno	Dinas Arpus
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	116 buku	Budaya Etnis	Dinas Arpus
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	%	Dinas Arpus
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	%	Dinas Arpus
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	19,33	%	Dinas Arpus
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	24,16	%	Dinas Arpus
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2.155	Jumlah Arsip	Dinas Arpus
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK	10.740	Jumlah Arsip	Dinas Arpus
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kota yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinss Arpus
Urusan Pilihan						
25	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)				
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	560	orang	Dispertan pangan
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	%	Dispertan pangan
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kota/ kota yang diterbitkan	0	Izin	Dispertan pangan
		4	Jml pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	170	Pembudidaya	Dispertan pangan
		5	Jml benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	117.669.750	Benih	Dispertan pangan
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	75		Disbudpar
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	715		Disbudpar
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kota	672	TDUP	Disbudpar
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	11	orang	Disbudpar
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	14	Kegiatan	Disbudpar
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota	0	keg	Disbudpar
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	95	Industri	Disbudpar
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	11,08		Disbudpar

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	63,58		Disbudpar
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	30	Lokasi	Disbudpar
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	97	Unit	
		2	Prasaran pertanian yang digunakan	97		
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	160	dok	
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	100	%	
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten	60,63	%	
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Dok	Dinas PUPR
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	11		Dinas PUPR
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	2,513		Dinas PUPR
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0		Dinas PUPR
29	ESDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota				
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		ada/tidak	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :			Dinas Perdagangan
			a. Pusat perbelanjaan	0	%	
			b. Toko swalayan	100	%	
		2	presentas epenerbitan TDG	91,67	%	Dinas Perdagangan
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	10,38		Dinas Perdagangan
		4a	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0,00	%	Dinas Perdagangan
		4b	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0,00	%	Dinas Perdagangan
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0,00	%	Dinas Perdagangan

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/kota	0,00	%	Dinas Perdagangan
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	%	Dinas Perdagangan
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	9,00	%	Dinas Perdagangan
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	60,30	%	Dinas Perdagangan
		1	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	0,00	Pengaduan	Dinas Perdagangan
		2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	0,00	Konsumen	Dinas Perdagangan
		Persentase kinerja realisasi pupuk				
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	21595,477 / 22368		Dinas Perdagangan
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	6,56	%	Dinas Perdagangan
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0	%	Dinas Perdagangan
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota				
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota	0,00	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP				
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	50	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	100,00	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait				

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri kecil yang diterbitkan	100	%	Disnaker perinkop UKM
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
		1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di ka/kota	100		Disnaker perinkop UKM
31	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya		Kawasan	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Permukiman	
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya		Permukiman	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,57	%	Disdikpora
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,96	%	Disdikpora
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,48	%	Disdikpora
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	92,8	%	Disdikpora
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,6		Dinas Kesehatan
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	100,00	%	Dinas Kesehatan
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99,07	%	Dinas Kesehatan

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%	Dinas Kesehatan
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,94	%	Dinas Kesehatan
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	92,68	%	Dinas Kesehatan
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	%	Dinas Kesehatan
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	91,05	%	Dinas Kesehatan
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	92,84	%	Dinas Kesehatan
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,24	%	Dinas Kesehatan
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,35	%	Dinas Kesehatan
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	92,33	%	Dinas Kesehatan
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	106,77	%	Dinas Kesehatan
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00	%	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	100	%	Dinas PUPR
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	tidak ada wilayah pantai	%	Dinas PUPR
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	90,28	%	Dinas PUPR

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	98,60	%	Dinas PUPR
		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	%	Dinas PUPR
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100	%	Dinas PMPTSP
		25	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	94,69	%	Dinas PUPR
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	43,49	%	Dinas PUPR
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	%	Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	%	Dinas PKPLH
		28	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Nihil	%	Dinas PKPLH
		29	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	94,09	%	Dinas PKPLH
		30	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,57	%	Dinas PKPLH
		31	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100,00	%	Dinas PKPLH
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	%	Satpol PP
		33	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00	%	Satpol PP
		34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	84.995	Orang	BPBD
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	73.170	Orang	BPBD

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	87.596	Orang	BPBD
		37	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	%	BPBD
		38	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11,75	Menit	Satpol PP
6	Sosial	39	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	96,20	.%	Dinsos P3AP2KB
		40	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100	%	Dinsos P3AP2KB
7	Tenaga Kerja	41	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	94,74	%	Disnaker Perinkop UKM
		42	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	70,11	%	Disnaker Perinkop UKM
		43	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	15092934 564,43		Disnaker Perinkop UKM
		44	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	91,64	%	Disnaker Perinkop UKM
		45	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	70,40	%	Disnaker Perinkop UKM
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	100,00	%	Dinsos P3AP2KB
		47	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	100	%	Dinsos P3AP2KB
		48	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		Per 100.000	Dinsos P3AP2KB
9	Pangan	49	Persentase cadangan pangan	201,12	%	Dispertan Pangan

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
10	Pertanahan	50	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	%	Dinas PUPR
		51	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	60,93	%	Dinas PUPR
		52	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100,00	%	Dinas PUPR
		53	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0,00	%	Dinas PUPR
		54	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0,00	%	Dinas PUPR
		55	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	%	Dinas PUPR
11	Lingkungan Hidup	56	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	60,80	%	Dinas PKPLH
		57	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	84,63	%	Dinas PKPLH
		58	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	17,72	%	Dinas PKPLH
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	59	Perekaman KTP Elektronik	99,66	%	Dinas Dukcapil
		60	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	74,74	%	Dinas Dukcapil
		61	Kepemilikan akta kelahiran	99,96	%	Dinas Dukcapil
		62	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	33,33	%	Dinas Dukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	63	Persentase pengentasan desa tertinggal	tdk ada desa tertinggal	%	Dinas PMD
		64	Persentase peningkatan status desa mandiri	85,71	%	Dinas PMD
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,11		Dinsos P3AP2KB
		66	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	71,49	%	Dinsos P3AP2KB

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		%	Dinsos P3AP2KB
15	Perhubungan	68	Rasio konektivitas kabupaten	0,68		Dishub
		69	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,59		Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	70	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo
		71	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	66,67	%	Dinas Kominfo
		72	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab	100	%	Dinas Kominfo
17	Koperasi dan UKM	73	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	71,52	%	Disnaker Perinkop UKM
		74	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	100	%	Disnaker Perinkop UKM
18	Penanaman Modal	75	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	14,67	%	Dinas BMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	76	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,99	%	Disdikpora
		77	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	73,10	%	Disdikpora
		78	Peningkatan prestasi olahraga	3	Medali	Disdikpora
20	Statistik	79	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	%	Dinas Kominfo
		80	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	%	Dinas Kominfo
21	Persandian	81	Tingkat keamanan informasi pemerintah	50,23		Dinas Kominfo
22	Kebudayaan	82	Terlestarikannya Cagar Budaya	78,31	%	Disbudpar
23	Perpustakaan	83	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	51,19	%	Dinas Arpus
		84	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	64,63	%	Dinas Arpus

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
24	Kearsipan	85	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	59,5	%	Dinas Arpus
		86	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap	33,3	%	Dinas Arpus
Urusan Pilihan						
25	Kelautan Perikanan	87	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	2763.59	Ton	Dispertan Pangan
26	Pariwisata	88	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1.572,73	%	Disbudpar
		89	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	77,00	%	Disbudpar
		90	Tingkat Hunian akomodasi	27,45	%	Disbudpar
		91	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	7,48	%	Disbudpar
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,24	%	Disbudpar
27	Pertanian	93	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,6	ton	Dispertan Pangan
		94	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0	%	Dispertan Pangan
28	Kehutanan			Tidak Perlu Diisi		
29	ESDM	95	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	0,00	%	
30	Perdagangan	96	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	100	%	Dinas Perdagangan
		97	Persentase kinerja realisasi pupuk	16010	%	Dinas Perdagangan
		98	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	6,56	%	Dinas Perdagangan
31	Perindustrian	99	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	0,43	%	Disnaker Perinkop UKM

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		100	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	96,12	%	Disnaker Perinkop UKM
		101	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	%	Disnaker Perinkop UKM
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	%	Disnaker Perinkop UKM
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0,00	%	Disnaker Perinkop UKM
		104	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100		Disnaker Perinkop UKM
32	Transmigrasi					

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
33	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	9,84	%	BPPKAD
		2	Persentase PAD	22,07	%	BPPKAD
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level 3	Level	Inspektorat
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3	Level	Inspektorat
		5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	15,49	%	BPPKAD

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	Inspektorat
					WTP	
					WTP	
					WTP	
34	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,00	%	Bagian PBJ
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	70,96	%	Bagian PBJ
		9	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	46,13	%	Bagian PBJ
			Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah	233,52		Bagian PBJ
35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	51,76	%	BKPSDM
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,33	%	BKPSDM
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100,00	%	BKPSDM
36	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-6,24	%	BPPKAD
		14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-16,91	%	BPPKAD
		15	Assets management	4,00	Jumlah	BPPKAD
				KIB A s/d KIB E	ya	
				Permendagri No. 47 Tahun 2021	ya	
				Rekon 1 th sekali	ya	
				Rekapitulasi Barang ke Neraca	ya	
		16	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	12,59	%	BPPKAD

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
37	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi Dan Partisipasi Publik)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	114,55	,%	Dinas Kominfo
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	37,50	%	Dinas Kominfo

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

Skala penilaian capaian kinerja setiap indikator menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang selanjutnya dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber data : Permendagri 86 Tahun 2017

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Harapan Lama Sekolah	14,90
2.	Rata-rata lama sekolah	9,20
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	88,00
4.	Angka Harapan Hidup	76,54
5.	Angka Kematian Ibu	52,78
6.	Angka Kematian Bayi	6,9
7.	Kemampuan konsumsi rumahtangga perkapita	11.413,19

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	90
9.	Nilai Akutabilitas Kinerja	83,00
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,87
13.	Indeks Rasa Aman	0,53
14.	Indeks Toleransi	100%
15.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	144,87
16.	Angka Kemiskinan	5,9
17.	Angka Pengangguran	2,90
18.	Nilai Investasi	9,19 T
19.	Persentase (%) Insfrastruktur Dalam Kondisi Mantap	83,73
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,77

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Harapan lama sekolah	14,90	13,26	88,99
2.	Rata-rata lama sekolah	9,20	9,34	101,52
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	88,00%	90,40%	102,73%
4.	Angka Harapan Hidup	76,54	76,86	100,42
5.	Angka Kematian Ibu	52,78	82,67	43,37
6.	Angka Kematian Bayi	6,9	7,82	86,67
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	11.413,19	12.088,00	105,91
8	Indeks Reformasi Birokrasi	90	71,36	79,29
9.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	83,00	72,05	86,81
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Masih dalam proses	

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	89,33	105,09
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,87	4,23	147,39
13.	Indeks rasa aman	0,53	0,98	15,09
14.	Indeks Toleransi	100%	100%	100%
15.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	144,87	138,70	95,74
16.	Angka Kemiskinan	5,9	7,24	77,29
17.	Angka Pengangguran	2,90	3,25	87,29
18.	Nilai Investasi	9,19 T	11,80 T	128,4
18..	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	83,73	85,43	102,03
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,77	60,80	89.72

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan tahun dalam sebelumnya

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kierja Tahun					
		2022			2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Harapan Lama Sekolah	14,67	13,24	90,32	14,90	13,26	88,99
2.	Rata-rata lama sekolah	9,01	9,06	100,55	9,20	9,34	101,52
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,77%	87,87%	100,11	88,00%	90,40%	102,73
4.	Angka Harapan Hidup	76,52	76,78	100,30	76,54	76,86	100,42
5.	Angka Kematian Ibu	52,78	88,24	32,82	52,78	82,67	43,37
6.	Angka Kematian Bayi	7,1	5,96	116,06	6,9	7,82	86,67
7.	Kemampuan konsumsi rumahtangga perkapita	11.271,84	11.609,00	102,99	11.413,19	12.088,00	105,91
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	85	69,21	81,42	90	71,36	79,29
9.	Nilai Akutabititas Kinerja	81,00	71,13	87,81	83,00	72,05	86,81
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih dalam proses	
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5	88,31	105,76	85	89,33	105,09

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kerja Tahun					
		2022			2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,68	3,38	126,12	2,87	4,23	147,39
13.	Indeks Rasa Aman	0,53	0,86	162,26	0,53	0,98	184,91
14.	Indeks Toleransi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	139,78	126,95	90,82	144,87	138,70	95,74
16.	Angka Kemiskinan	6,1	7,41	82,32	5,9	7,24	77,29
17.	Angka Pengangguran	3,05	3,21	95,02	2,90	3,25	87,93
18.	Nilai Investasi	8,79 T	10,30 T	117,18	9,19 T	11,80 T	128,4
19.	Persentase (%) Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	82,72%	84,86	102,59	83,73	85,43	102,03
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,56	54,88	82,45	67,77	60,80	89,72

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD 2023	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1.	Harapan Lama Sekolah	94,63	93,17	91,69	90,32	14,90	13,26	88,99	14,90	88,99
2.	Rata-rata lama sekolah	102,13	102,94	100,69	100,55	9,20	9,34	101,52	9,20	101,52
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	99,93	103,80	98,39	100,11%	88,00	90,40%	102,73%	88,00%	102,73%
4.	Angka Harapan Hidup	100,03	100,14	100,35	100,30	76,54	76,86	100,42	76,54	100,42
5.	Angka Kematian Ibu	89	28,67	-54,68	32,82	52,78	82,67	43,37	52,78	43,37
6.	Angka Kematian Bayi	95	89,86	107,53	116,06	6,9	7,82	86,67	6,9	86,67
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga perkapita	104,33	101,55	101,27	102,99	11.413,19	12.088,00	105,91	11.413,19	105,91
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	85,80	90,89	85,46	81,42	90	71,36	79,29	90	79,29
9.	Nilai Akutabilitas Kinerja	94,13	95,08	92,60	87,81	83,00	72,05	86,81	83,00	86,81
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih dalam proses		WTP	Masih dalam proses
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,16	105,87	104,67	105,76	85	89,33	105,09	85	105,09

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD 2023	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	128,17	131,06	98,83	126,12	2,87	4,23	147,39	2,87	147,39
13.	Indeks Rasa Aman	161,54	103,77	83,02	162,26	0,53	0,98	184,91	0,53	184,91
14.	Indeks Toleransi	100 %	91,67	91,67	100%	100%	100%	100%	100 %	100%
15.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	99,59	96,77	94,51	90,82	144,87	126,95	95,74	144,87	95,74
16.	Angka Kemiskinan	99,70	86,67	81,71	82,32	5,9	7,24	77,29	5,90	77,29
17.	Angka Pengangguran	85,49	29,84	80,32	95,02	2,90	3,25	87,93	2,90	87,93
18.	Nilai Investasi	77,25	42,12	472,90	117,18	9,19 T	11,80 T	128,4	9,19 T	128,4
19.	Persentase (%) Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	101,26	103,06	102,30	102,59	83,73	85,43	102,03	83,73	102,03
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101,22	100,84	96,05	82,45	67,77	60,80	89,72	67,77	89,72

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan kinerja yang dicapai

1. Meningkatkan kualitas pendidikan

Realisasi sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan lama sekolah	Proporsi lama sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang
		Rata-rata lama sekolah	Partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan
		Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	Jumlah nilai rata-rata dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Persentase Sekolah/Lembaga terakreditasi A jenjang pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Harapan lama sekolah	94,63	93,17	91,69	90,32	14,90	13,26	88,99	14,90	88,99
2.	Rata-rata lama sekolah	102,13	102,94	100,69	100,55	9,20	9,34	101,52	9,20	101,52
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	99,93	103,80	98,39	100,12	88,00	90,40	102,73	88,00%	102,73
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	98,90	99,97	96,92	97,00			97,74		97,74

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, BPS, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 97,74%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,74% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 97,00%.

Perhitungan Capaian s/d 2023 akhir RPJMD Tahun 2023

$$\% \text{ Capaian Akhir RPJMD Tahun 2023} = \frac{\text{Target} - \text{Realisasi 2023}}{\text{Realisasi 2023}} \times 100\%$$

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 :

1. Harapan lama sekolah $\frac{14,90 - 13,26}{13,26} \times 100\% = -12,37\%$
2. Rata-rata lama sekolah $\frac{9,20 - 9,34}{9,34} \times 100\% = 1,50\%$
3. Persentase (%) akses dan mutu pendidikan $\frac{88,00 - 90,40}{87,87} \times 100\% = 2,65\%$

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Harapan lama sekolah tahun 2023 sebesar 88,99%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,33% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 90,32%, Realisasi Tahun 2023 sebesar 13,26 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 13,25 mengalami kenaikan sebesar 0,01

Meningkatnya dari Realisasi Tahun 2023 sebesar 13,26 dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 13,25 menunjukkan secara rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk jenjang formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,26 tahun atau setara dengan D-2. Faktor yang mendukung realisasi ini adalah tersedianya lembaga pendidikan hingga kepedesaan meningkat sehingga akses masyarakat untuk bersekolah hingga perguruan tinggi.

Program yang mendukung Realisasi Harapan Lama Sekolah adalah Program Peningkatan Pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kudus sebesar Tahun 2023 mengalami peningkatan sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2022.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan menjadi 13,26 dibandingkan 12,85 (Jawa Tengah), maknanya penduduk di Kabupaten Kudus telah mengenyam pendidikan rata – rata di jalur perguruan tinggi.

- b. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus adalah 9,34 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk sekolah sampai kelas 3 SMP.

Meningkat dari target yaitu 9,20 dengan realisasi sebesar 9,34. Faktor yang mempengaruhi angka ini adalah partisipasi sekolah dimana tingkat atau fokus tertinggi yang pernah atau sedang diduduki semakin meningkat juga ijazah dari jenjang dari jenis pendidikan yang pernah atau sedang diduduki semakin meningkat.

Program yang mendukung realisasi rata-rata lama sekolah adalah program peningkatan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah dasar, Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, program pendidikan Anak Usia dini, dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.

Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah (8,01)

Peningkatan realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari realisasi peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Efektifitas tersebut karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat secara optimal sehingga berpengaruh pada tingkat kelulusan peserta didik menjadi 100% yang berimbas pada capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah.

- c. Angka capaian kinerja IKU Persentase (%) akses dan mutu pendidikan tahun 2023 sebesar 100,73%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,61% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,12%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 90,40 % apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 87,87% mengalami kenaikan sebesar 2,53%.

Pesertase Akses dari Mutu

Dari Target tahun lalu 2023 sebesar 88,00, Realisasi sebesar 90,40. Realsisasi tersebut dipengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Presentase Sekolah atau lembaga terakreditasi A pada jenjang pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan masyarakat.

Faktor yang mendukung APM adalah kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dari jenjang PAUD hingga SMP Meningkatkan.

- Angka Kelulusan adalah kelulusan tidak lagi ditentukan oleh Ujian Nasional melainkan oleh sekolah sehingga sekolah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk meluluskan siswa meski tetap berpedoman pada ketentuan nasional.
- Sekolah Atau Lembaga yang terakreditasi yang meningkat dipengaruhi jumlah sekolah yang terakreditasi meningkat. Program yang mendukung realisasi Presentase Akses dan Mutu adalah program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, program pendidikan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Meningkatkan kualitas pendidikan berindikator persentase akses dan mutu pendidikan daerah semakin menurun karena ada penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan dasar, akreditasi jenjang PAUD dan Dikmas yang perlu ditingkatkan dan penyesuaian sistem perhitungan akses dan mutu pendidikan. Nilai kelulusan dan akreditasi menggambarkan mutu pendidikan dan nilai partisipasi menggambarkan akses pendidikan. Kedepan diharapkan nilai partisipasi bisa mencapai 100% sehingga berdampak pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Ketiga indikator tersebut didukung dengan 4 (empat) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
3. Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
4. Program Pengembangan kapasitas kepemudaan

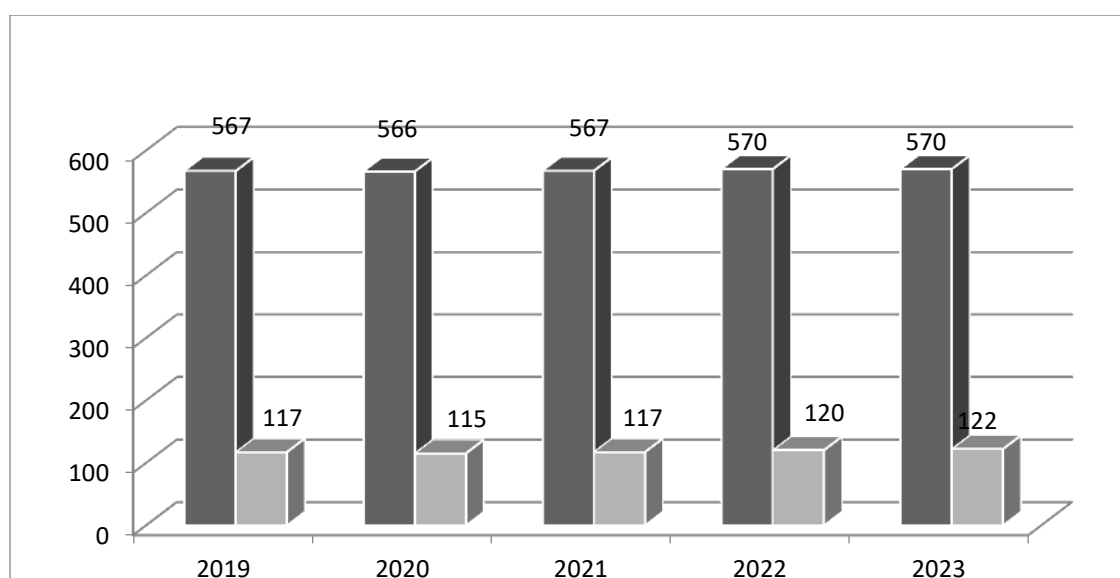
Penurunan target tersebut disebabkan karena faktor :

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan dasar.
- b. Akreditasi jenjang PAUD.
- c. Pendidikan Masyarakat perlu ditingkatkan dan penyesuaian sistem perhitungan akses dan mutu pendidikan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan adalah 97,74% atau Sangat tinggi

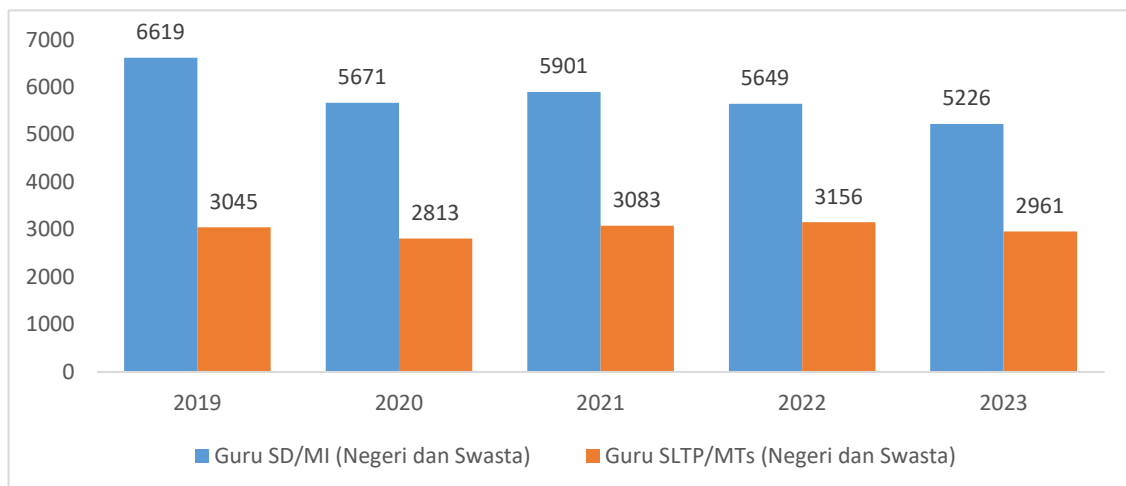
Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dalam dunia Pendidikan dapat dilihat dari Penyediaan sarana dan prasarana berupa gedung sekolah pada satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus, berikut jumlah sekolah tingkat dasar, guru dan murid di Kabupaten Kudus:

Grafik 3.1.
Banyaknya Sekolah SD/MI dan SLTP/MTs
(Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



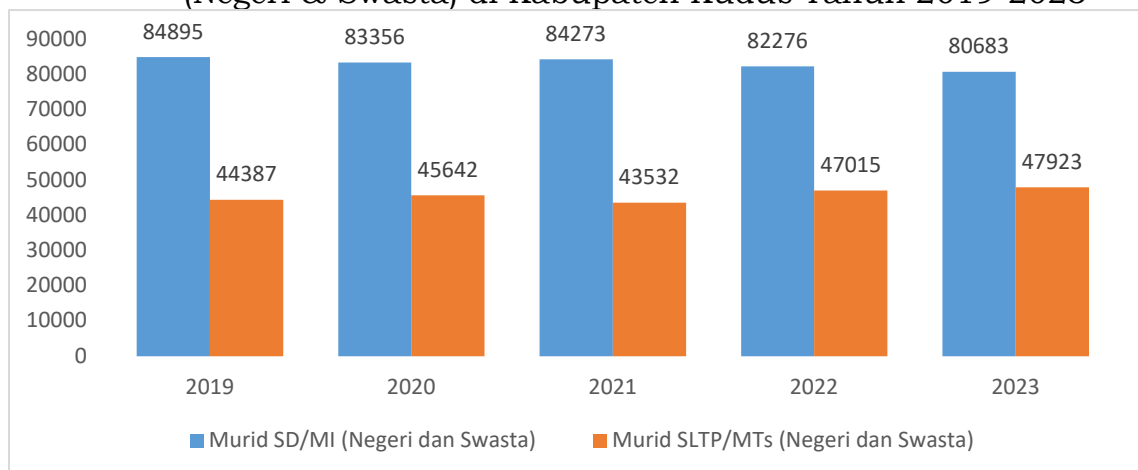
Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Grafik 2.2
Banyaknya Guru untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs
Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Grafik 2.3
Banyaknya Murid untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs
(Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Penduduk yang bersekolah di sekolah negeri dan swasta selama periode tahun 2023 – 2024 secara umum mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya murid di setiap jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tingkat pendidikan jika dibanding dengan tahun sebelumnya, pendidikan dasar yaitu SD (Negeri dan Swasta) di tahun ajaran 2023/2024 jumlah murid yang bersekolah mengalami penurunan 1.593 murid. Untuk pendidikan SLTP (Negeri dan Swasta) juga mengalami kenaikan jumlah murid sebesar 908 murid.

Peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah, tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai. Pada tahun ajaran 2023/2024, tersedia jumlah SD sebanyak 424 unit dan MI sebanyak 146 unit, SLTP dan MTs masing-masing sebanyak 52 dan 68 unit.

Jumlah universitas / perguruan tinggi pada tahun akademik 2023/2024 tercatat ada 8 buah, yaitu Universitas Muria Kudus (UMK) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Cendekia Utama Kudus, Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), AKBID Mardi Rahayu, AKBID Penda, Akper Krida Husada dan Akademi Kebidanan Muslimat NU Kudus.

**Penghargaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kudus Tahun 2023**

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI YANG DIBERIKAN	TAHUN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN/ DOKUMENTASI
1.	Anugrah Merdeka Belajar Kategori Pemerintah Daerah Transformatif Sub Kategori Program Indonesia Pintar	Kemdikbudristek RI	2023	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2	Terbaik I Apresiasi GTK GTK Inovatif Pada Satuan PAUD Tingkat Provinsi	Pos Paud Sidomakmur Dawe	2023	Siti Rohmatun	
3	Terbaik II Apresiasi GTK GTK Inovatif Pada Satuan PAUD Tingkat Provinsi	TPA Bintang Kecil Gebog	2023	Tika Budi Kartika	
4.	Juara I Porseni IGTKI PGRI Tari Kreasi Baru Tingkat Provinsi	IGTKI PGRI Kabupaten Kudus	2023	Tim Tari Kreasi Baru	

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI YANG DIBERIKAN	TAHUN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN/ DOKUMENTASI
5.	Juara 2 Porseni IGTKI PGRI Alat Peraga Tingkat Provinsi	TK Pertiwi Kluwukan Dawe	2023	Miftah Faris	
6.	Olimpiade SAIN Nasional (OSN) Matematika Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional	SMP Keluarga Kudus	2023	Celine Jovita P.	
7.	Juara I Menyanyi Solo Festival dan Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional	SMP 1 Kudus	2023	Grisalda Jeth Jan'ma Gayatri	
8.	Juara I Mendongeng Putra Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Jawa Tengah	SD 6 Cendono Dawe Kudus	2023	M. El Fito Cahya Jatmika	
9.	Olimpiade SAIN Nasional (OSN) Matematika Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional	SMP Keluarga Kudus	2023	Feivel Yonathan Susanto	
10.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional	SMP 4 Bae Kudus	2023	SMP 4 Bae Kudus	
11.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional	SMP 3 Bae, SMP 4 Bae, dan SMP IT Al Islam Kudus	2023	SMP 3 Bae, SMP 4 Bae, dan SMP IT Al Islam Kudus	

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola moralitas menurut umur
		Angka Kematian Ibu	Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dikali 100.000
		Angka Kematian Bayi	Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 Tahun) selama tahun tertentu dibagi banyaknya kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Angka Harapan Hidup	100,03	100,14	100,35	100,31	76,54	76,86	100,42	76,54	100,42
2.	Angka Kematian Ibu	89	28,67	-54,68	32,82	52,78	82,67	43,37	52,78	43,37
3.	Angka Kematian Bayi	95	89,86	107,53	116,06	6,9	7,82	86,67	6,9	86,67
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	94,68	72,89	51,07	83,06			76,86		76,86

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, BPS, LKj IP Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 76,81%. Angka tersebut kurang sebesar 6,25% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 83,067%

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023

$$1. \text{ Angka Harapan Hidup } \frac{76,86}{76,54} \times 100\% = 100,42\%$$

- | | |
|------------------------|--|
| 2. Angka Kematian Ibu | $\frac{52,78 - (82,67-52,78)}{52,78} \times 100\% = 43,37\%$ |
| 3. Angka Kematian Bayi | $\frac{6,90 - (7,82-6,90)}{6,90} \times 100\% = 86,67\%$ |

2) Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Angka Harapan Hidup tahun 2023 sebesar 100,42%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,11% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,31%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 76,84 dipengaruhi oleh:

1. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dengan capaian kinerja 97,77 %
2. Cakupan pelayanan pengendalian penyakit dengan capaian kinerja 92,80%
3. Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan dengan capaian kinerja 96,73%

apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 76,76 telah mengalami penurunan sebesar 0,07

Faktor pendukung keberhasilan capaian Angka Harapan Hidup Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat serta terlibat langsung pada gerakan hidup bersih dan sehat pada setiap lini kehidupan
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan
3. Meningkatnya sosialisasi upaya promotif dan preventif dari tenaga kesehatan dengan optimalisasi pemanfaatan media sosial sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat meningkat
4. Peningkatan system rujukan pada kasus kegawatdaruratan lebih terkoordinasi dengan baik
5. Kemampuan deteksi dini kasus serta pengambilan keputusan yang tepat meningkat
6. Kapasitas SDM Kesehatan meningkat
7. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar meningkat status akreditasinya sehingga kualitas pelayanan meningkat
8. Sarana prasarana penunjang kesehatan terpenuhi sesuai standar

Program/kegiatan yang mendukung capaian angka harapan hidup adalah :

- 1) Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan.

- 2) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/KLB/Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular, dengan senantiasa melibatkan lintas sektoral dan lintas program
- 3) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboratorium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.

- b. Angka capaian kinerja IKU Angka Kematian Ibu Tahun 2023 sebesar 43,37%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 32,82% terjadi peningkatan karena dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 10,55%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 82,67 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 88,24 Permasalahan/penyebab penurunan pada pencapaian target Angka Kematian Ibu pada Tahun 2023 masih belum optimal karena (11) sebelas kasus kematian terbanyak penyebabnya karena penyulit kehamilan dan persalinan yaitu perdarahan 6 kasus , Pre eklamsia / eklamsia 1 kasus, efusi pleura 1 serta penyakit penyerta yaitu 2 kasus kanker payudara dan 1 kanker rektum.

Berbagai upaya telah dilakukan meliputi meningkatkan akses layanan bagi ibu dan bayi baru lahir berupa peningkatan jumlah kunjungan ANC dari 4 kali menjadi 6 kali yaitu 1 kali pada kehamilan trimester pertama, 2 kali pada kehamilan trimester kedua dan 3 kali pada kehamilan trimester ke tiga, kontak dengan dokter spesialis kandungan minimal 2 kali serta pemeriksaan triple eliminasi yaitu pemeriksaan hepatitis B, HIV dan sifilis, persalinan di fasilitasi pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir berupa penguatan antenatal, persalinan dan post natal sesuai standar.

Berdasarkan hasil analisis data resiko tinggi ibu hamil tahun 2023 lebih tinggi dari target nasional yaitu 20% sedangkan di Kabupaten Kudus turun menjadi 22,88%, hal ini karena masih banyaknya ibu hamil yang seharusnya tidak layak hamil tapi tetap hamil yaitu ibu hamil dengan 4 T (Terlalu muda, Terlalu

tua, Terlalu banyak, dan Terlalu sering) serta ALKI (Anemia, Lila kurang dari 23,5 cm, penyakit kronis dan penyakit Infeksi menular seksual. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab tidak langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit kronis seperti efusi pleura akibat peradangan pada paru . Faktor penyebab kematian yang lain adalah faktor usia, jumlah anak (paritas), eklamsia, dan perdarahan.

Upaya yang telah ditempuh adalah penerapan konsep safe motherhood yaitu penguatan “Keluarga Berencana”, memastikan bahwa baik individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi dan layanan keluarga berencana untuk merencanakan waktu, jumlah dan jarak kehamilan, penguatan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Hal ini dimaksudkan agar ibu hamil benar-benar merupakan kehamilan yang diinginkan dan kondisi ibu sehat. diusahakan tidak hamil lagi atau tidak hamil dulu sebelum kondisi ibu sehat.

Program kegiatan pendukung Program /kegiatan yang mendukung capaian angka kematian ibu adalah :

- 1) Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi serta desa siaga aktif, penguatan tata kelola meliputi pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada iu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN,
- 2) Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan.
- 3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/KLB/Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular.
- 4) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboratorium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.

Berdasarkan analisis program kegiatan yang dilaksanakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

Analisa kegagalan /faktor pendukung kegagalan pencapaian target berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilaksanakan di Kabupaten tahun 2023 penyebab kematian terbanyak akibat penyulit kehamilan dan persalinan yaitu 7 kasus dari 11 kasus kematian ibu yaitu 63,63%, penyakit penyerta sebanyak 4 kasus yaitu 36,36 % karena penyakit penyerta yaitu efusi pleura dan kanker.

Strategi yang digunakan untuk menutunkan angka kematian ibu adalah sebagai berikut :

1. Penguatan puskesmas dan jaringannya
2. Penguatan manajemen program
3. Peningkatan peran serta masyarakat
4. Penguatan kerjasama dan kemitraan melalui forum komunikasi masyarakat
5. Penguatan akselerasi dan inovasi dengan cara optimalisasi aplikasi Si BULAN dalam rangka percepatan system rujukan kasus kegawatdaruratan maternal neonatal
6. Audit Kematian Ibu
7. Peningkatan upaya protif dan preventif faktor penyebab kematian langsung maupun tidak langsung

c. Angka capaian kinerja IKU Angka Kematian Bayi tahun 2023 sebesar 86,67%. Angka tersebut menurun sebesar 29,39 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 116,06%. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kasus kematian bayi di Kabupaten Kudus sejumlah 104 bayi dari total kelahiran hidup dalam 1 (satu) tahun sejumlah 13.306 bayi x 1.000 kelahiran hidup.

Realisasi Tahun 2023 sebesar 7,82 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 5,96 mengalami kenaikan sebesar 1,86

Faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian bayi sebanyak 104 kasus:

1. Asfiksia sebanyak 20% yaitu kasus kegagalan bayi baru lahir untuk bernafas secara spontan dan teratur
2. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 26% karena belum kematangan organ yang disebabkan persalinan sebelum waktunya atau premature.
3. Kelainan kongenital sebanyak 11% karena kegagalan pertumbuhan (proses embryogenesis) saat hamil yang menyebabkan kelainan kongenital atau cacat bawaan.
4. Terkonfirmasi covid 19 dan lainnya sebanyak 43%

Program kegiatan pendukung program/kegiatan yang mendukung capaian angka kematian bayi adalah Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan meliputi

pelayanan kesehatan keluarga dan gizi melalui kegiatan pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN, pendampingan ke rumah sakit rujukan, serta kegiatan Audit Maternal Perinatal, pembinaan tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan AKI-AKB, pengawasan ibu hamil resiko tinggi dengan sosialisasi dan penempelan stiker P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) di rumah ibu hamil.

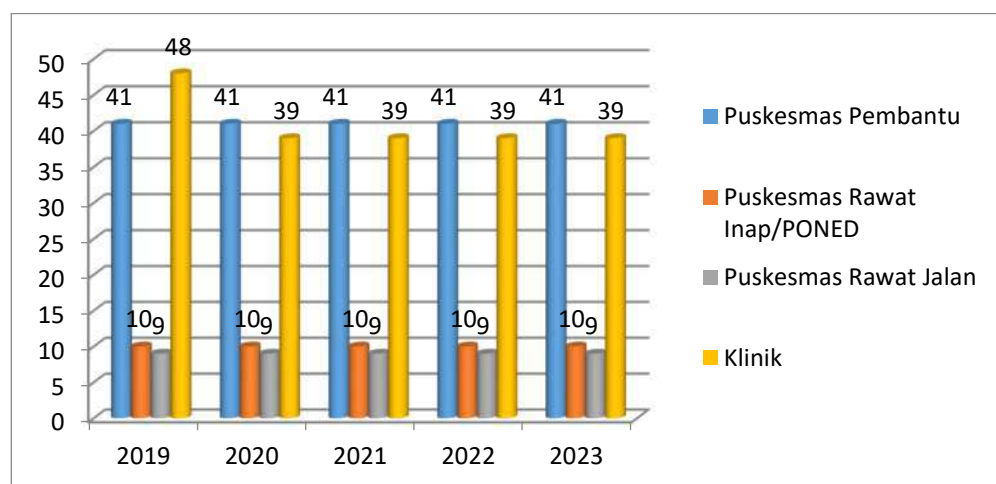
Upaya penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 dilaksanakan melalui:

1. Pelaksanaan program kunjungan neonatal yang optimal.
2. Memberikan asuhan bayi baru lahir melalui pemberian pelayanan.
3. Deteksi dini tanda bahaya.
4. Menjaga kehangatan dan pemberian ASI.
5. Mencegah infeksi dan pendarahan dengan memberikan vitamin K injeksi untuk menurunkan resiko kesakitan dan kematian.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 76,86% atau Tinggi

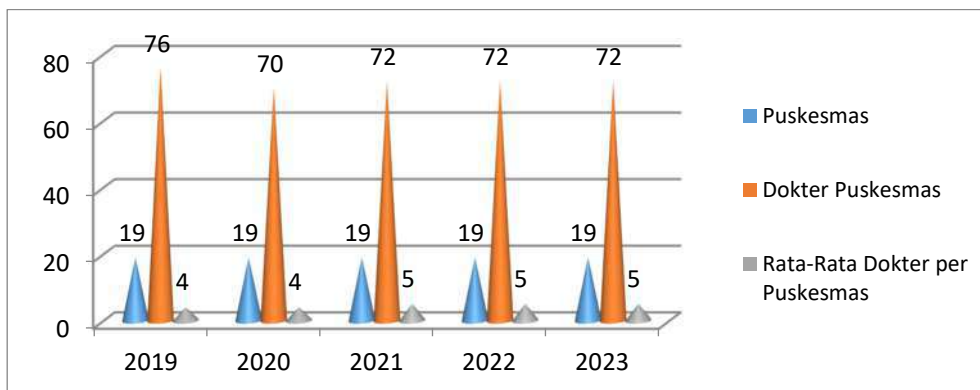
Sarana dan prasarana Kesehatan di Kabupaten Kudus

Grafik 2.4
Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat
Di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



Sumber data : DKK Tahun 2023

Grafik 2.5
Banyaknya Puskesmas dan Rata-Rata Dokter Tiap Puskesmas
di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



Sumber data : DKK Tahun 2023

Pada tahun 2023 sarana kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang merupakan sarana kesehatan yang terjangkau dan dapat menunjang kesehatan masyarakat hingga pedesaan jumlahnya mencapai 19 buah. Upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, maka dilaksanakan akreditasi dengan status sebagai berikut :

- Status akreditasi madya sejumlah 13 Puskesmas
- Status akreditasi utama sejumlah 4 Puskesmas
- Status akreditasi dasar sejumlah 2 Puskesmas

Sarana kesehatan lainnya, yang membantu kinerja Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pembangunan di bidang Kesehatan tidak lepas dari jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Peningkatan sarana kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pada RSUD dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus saat ini sudah terakreditasi dengan Status Paripurna.

3. Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	Total pengeluaran rumah tangga dibagi jumlah rumah tangga (dalam ribu rupiah perorang pertahun)

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Sasaran Kemampuan Konsumsi Masyarakat
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	104,33	101,55	101,27	102,99	11.413,19	12.088,00	105,91	11.413,19	105,91
2.	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	104,33	101,56	101,27	102,99			105,91		105,91

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bappeda (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 105,91%. Angka tersebut meningkat sebesar 2,92% dari capaian kinerja sasaran tahun 2022 sebesar 102,99%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 juga turun sebesar 2,92%.dari 102,99%.

Perhitungan Capaian s/d 2023 akhir RPJMD Tahun 2023

$$\% \text{ Capaian Akhir RPJMD Tahun 2023} = \frac{\text{Target} - \text{Realisasi 2023}}{\text{Realisasi 2023}} \times 100\%$$

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023

$$1. \text{ Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita} \quad \frac{11.413,19 - 12.088,00}{12.088,00} \times 100\% = 5,58\%$$

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita tahun 2023 sebesar 105,91%. Angka tersebut naik sebesar 2,92% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 102,99%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 12.088,00 sama dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 11.609,00.

Realisasi sebesar 12.088,00 adalah dari Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Angka-angka konsumsi/ pengeluaran rata-rata per kapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Faktor yang mendukung keberhasilan kemampuan konsumsi masyarakat

Masih diterapkannya kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat akibat pandemic covid19 pada tahun 2023, kecenderungan tingkat konsumsi masyarakat per kapita justru terjadi peningkatan. Salah satu factor yang mempengaruhi adalah, dengan terbatasnya pergerakan masyarakat, maka keinginan untuk melakukan aktivitas konsumtif dalam rumah justru semakin meningkat, apalagi didukung dengan semakin mudahnya layanan belanja via online.

Program yang mendukung Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita adalah :

1. Program peningkatan ketahanan pangan
2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
4. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial

Faktor penyebab keberhasilan

Realisasi sasaran meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat pada tahun 2023 mampu melampaui target yang telah ditetapkan karena faktor terjaganya stabilitas harga-harga barang terutama kebutuhan pokok serta kondusifitas wilayah yang cenderung stabil. Meskipun terjadi penurunan produktivitas masyarakat ditinjau dari segi lapangan usaha, namun untuk pengeluaran konsumsi masyarakat masih dapat dipertahankan dengan menjaga ketersediaan barang bahan kebutuhan pokok dan terjaminnya stabilitas harga barang.

Program kegiatan yang mendukung keberhasilan antara lain adalah monitoring ketersediaan barang dan harga barang secara rutin oleh tim pengendalian inflasi daerah.

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 105,91 % atau Sangat Tinggi.

4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Realisasi Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN & RB
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dari Kementerian PAN & RB
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Evaluasi Penerapan SPBE dari Kementerian PAN & RB

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	85,80	90,89	85,47	81,42	90	71,36	79,29	90	79,29
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	94,13	95,08	92,60	87,81	83	72,05	86,81	83	86,81
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NA		WTP	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,16	105,87	104,67	105,76	85	89,33	105,09	85	105,09
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	128,17	131,06	98,83	126,12	2,87	4,23	147,39	2,87	147,39
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	102,32	104,58	95,39	100,28			104,05		104,05

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bagian Organisasi, BPPKAD, Dinas Kominfo Tahun 2022 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 104,05%. Angka tersebut melampaui sebesar 3,77% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 100,28%.

Perhitungan Capaian s/d 2023 akhir RPJMD Tahun 2023

1. Indeks Reformasi Birokrasi $\frac{90,00 - 71,36}{71,36} \times 100\% = -26,12\%$
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja $\frac{83,00 - 72,05}{72,05} \times 100\% = -16,85\%$
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) WTP x 100% = WTP
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) $\frac{85,00 - 89,33}{88,31} \times 100\% = 4,85\%$
5. Indeks Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) $\frac{2,87 - 4,23}{3,38} \times 100\% = 132,15\%$

2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 79,29% Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,13% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 81,42%

Tahun 2023 Kabupaten Kudus untuk Hasil Evaluasi RB dengan Nilai 71.36 dengan predikat Nilai BB pada tanggal 6 Februari 2024 dari KemenPAN RB. Untuk Catatan dan Rekomendasi dari Komponen RB General sebagai berikut :

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
1.	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	1 Terdapat Output atas Rencana Aksi yang belum relevandan cukup sebagai ukuran keberhasilan Rencana Aksi	1 Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran
			2 Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	2 Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
2.	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General		

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan		Rekomendasi
3.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	1	baik	1 Agar Perkada tentang SOTK mempedomani model penyederhanaan struktur organisasi untuk penyederhanaan birokrasi yang telah ditetapkan oleh MenpanRB sesuai surat MenpanRB Nomor B/467/KT.01 /2021 tanggal 27 Mei 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Tindak lanjut mekanisme penyederhanaan struktur organisasi saat ini agar berkoordinasi dengan KemenpanRB
4.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	1	segera ditetapkan menjadi peraturan	1 segera ditetapkan menjadi peraturan
5.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1	Sasaran tidak berorientasi hasil	1 Menyusun Cascading berjenjang sesuai denganpermenpan RB 89 tahun 2021 tentang penjenjangan
			2	Indikator tidak berorientasi pada hasil	2 Sosialisasi SPIP-T dan MR
			3	Target tidak SMART 4.	
			4	Pengendalian yang ada belum efektif	
			5	Keterjadian risiko tidak dipantau	
			6	Risiko kecurangan belum dikelola	
6.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	1	Cukup	1 Terlampir pada LHE ZI Unit Kerja

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan		Rekomendasi
7.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Sangat Baik	1 Informasi hasil evaluasi lebih rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Instansi Pemerintah
8.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
9.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip		Penjelasan terkait hasil tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	
10	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah diselesaikan	1	Belum menyampaikan Renaksi, Waktu tindak lanjut masih lama	1 Perlu Menyusun Renaksi dan Mempercepat Laju Tindak Lanjut
11	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan			
12	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	1	Pelaksanaan Reformasi Hukum cukup.	1 Pelaksanaan Reformasi Hukum perlu menjadi baik dan ditingkatkan.
13	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kabupaten Kudus masih berada pada predikat Cukup. - Penerapan Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN)berkelanjutan Terkait penyebarluasan data, walidata Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan sosialisasi hasil- hasil kegiatan statistik kepada publik melalui Portal Satu Data Kabupaten Kudus yang terintegrasi 	1 Pemerintah Kabupaten Kudus perlu menyusun suatu kebijakan /kaidah baku/ petunjuk teknis tentang penerapan Aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aksesibilitas, Keterbandingan dan Konsistensi yang berlaku untuk seluruh produsen data.

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
			dengan Portal Satu Data Indonesia. - Penerapan Aspek Relevansi Aktualitas dan Ketepatan Waktu, dan Aksesibilitas, telah dilakukan oleh produsen data, namun masih berdasarkan kepentingannya masing-masing	
14	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	1 Baik	1 Selamat dan tingkatkan prestasi yang sudah diraih.
15	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit		1 Agar menetapkan SKJ JPT dan JA;
				2 Agar melaksanakan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai secara berkala;
				3 Agar melaksanakan pemetaan talenta Instansi setiap level jabatan;
				4 Agar menyusun rencana suksesi sebagai hasil dari pemetaan talenta yang disesuaikan dengan pola karier Instansi, jabatan target, dan kompetensi teknis pegawai;
				5 Agar mengelola profil individu pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja termasuk analisis kesenjangan dan area pengembangan dengan memanfaatkan sistem informasi dan diperbarui secara berkala atau real time;

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
				6 Agar menyusun dan melaksanakan strategi/program pengembangan kompetensi dan kinerja jangka menengah sesuai dengan kebutuhan individu pegawai dan organisasi baik dalam bentuk klasikal maupun non-klasikal;
				7 Agar menetapkan kebijakan internal terkait pola karier Instansi serta tata cara promosi mutasi pegawai yang mengacu pada manajemen talenta;
				8 Agar melaksanakan penilaian dan pengayaan kinerja secara periodik sesuai dengan perencanaan kinerja secara berjenjang disertai dialog kinerja sebagai media analisis permasalahan kinerja pegawai
				9 Agar menyusun analisis permasalahan kinerja pegawai dan strategi untuk mengatasi permasalahan.
16	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik		
17	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		
18	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
19	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator		

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
		Kinerja Utama Makro		
20	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Non Makro		
21	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK		
22	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi		
23	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlikak	Cukup Sehat	
24	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	Waspada	<p>Rekomendasi 1 : Perbaiki mendasar terhadap proses promosi dan mutasi pegawai dengan internalisasi aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.</p> <p>Rekomendasi 2 : Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan (jika sudah ada), khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/penge lolaan gratifikasi di instansi. (2) Penegakan sanksi/hukuman penerimaan suap/ gratifikasi. (3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/ pimpinan untuk menciptakan perilaku yang menghindari penerimaan suap/ gratifikasi.

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
				<p>(4) Mekanisme pengaduan tindakan suap/ gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.;</p> <p>Rekomendasi 3 : Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan</p> <p>Rekomendasi 4 : Perbaiki mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut: (1) Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan</p>

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
				<p>perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa.</p> <p>(4) Mengintensifkan penggunaan vendor management system.</p> <p>(5) Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.</p> <p>(6) Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;</p>
				<p>Rekomendasi 5 Mempertahankan, menginovasikan, danmemonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan untuk melindungi pelapor praktik korupsi, hingga tidak ada lagi respons negatif terhadap pelapor praktik korupsi.;</p>
				<p>Rekomendasi 6 : Mempertahankan, menginovasikan, danmemonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, untuk meminimalkan hingga tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak eksternal dalam menentukan program/ kegiatan.;</p>

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
				<p>Rekomendasi 7 : Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.;</p>
				<p>Rekomendasi 8 : Mempertahankan penyediaan informasi tentang pelaksanaan tugas yang memadai, meskipun sebagian besar responden menganggap penyediaan informasi sudah baik.;</p>
				<p>Rekomendasi 9 : Perbaiki mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan (3) Evaluasi dan memotret sudut Pandan pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
25	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat		Tetap melaksanakan SKM dan melakukan evaluasi hasil SKM secara konsisten
26	Koefisien	Koefisien		

Untuk Catatan dan Rekomendasi dari Komponen RB Tematik sebagai berikut :

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
27	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	Penetapan sasaran belum sepenuhnya Menjawab permasalahan utama pada tema terkait	Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait
			Aspek perbaikan tata kelola belum menjadi intervensi berupa Rencana Aksi, seperti dalam hal perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
28	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	Aspek perbaikan tata kelola belum menjadi intervensi berupa Rencana Aksi, seperti dalam hal perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
29	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)		
30	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)		
31	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	Aspek perbaikan tata kelola belum menjadi intervensi berupa Rencana Aksi, seperti	Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
			dalam hal perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
32	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)		
33	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)		
34	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)		
35	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)		
36	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)		
37	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)		
38	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)		
39	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)		
40	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)		
41	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)		

- b. Angka capaian kinerja IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 sebesar 86,81% Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,00% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 87,81%

Tahun 2023 Kabupaten Kudus mendapatkan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dengan predikat Nilai BB pada tanggal 27 November 2022 dari KemenPAN RB. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Menyusun RPD Tahun 2024-2026 dan telah menyelesaikan penyusunan Renstra seluruh perangkat daerah (PD) yang mengacu pada RPD Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Perencanaan level Pemda yang tertuang dalam RPD maupun renstra PD yang mengacu pada RPD juga telah memenuhi kriteria baik, yaitu kinerja yang lebih berorientasi hasil, tepat level pengampu, dan penetapan target telah menyesuaikan kondisi capaian periode sebelumnya;
2. Menyempurnakan penjenjangan kinerja pada dengan memperhatikan prinsip logis, salah satunya ditemukan pada DPMPTSP terkait kinerja peningkatan nilai realisasi investasi;
3. Pengembangan aplikasi e-sakip terintegrasi sehingga target kinerja organisasi dapat terbagi hingga pada target individu;
4. Penyesuaian pedoman evaluasi AKIP PD yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021

- c. Angka capaian kinerja IKU Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) tahun 2023 Masih dalam proses dari BPK.

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus yang lebih efektif untuk melaksanakan program dan kegiatan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan Hasil Evaluasi dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sampai dengan Tahun 2023 sudah 11 (sebelas) kali dengan hasil WTP.

- d. Angka capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 sebesar 105,09% Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,67% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 105,76%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 89,33 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 88,31

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan kegiatan survey kepuasan masyarakat sebanyak 4 kali dengan hasil rata-rata pencapaian 89,33% dengan katagori Baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh:

- Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik di Perangkat Daerah serta Unit Pelayanan Lainnya;
 - Telah dilaksanakan forum konsultasi publik dalam rangka partisipasi masyarakat untuk perbaikan layanan publik di Perangkat Daerah serta Unit Pelayanan Lainnya;
 - Pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat secara elektronik yang dilaksanakan serentak mulai triwulan 1 s.d triwulan IV;
 - Dilaksanakan evaluasi kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dengan nilai 96,11 berkategori Zona hijau kategori kualitas tertinggi.
- e. Angka capaian kinerja IKU Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 sebesar 147,39%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 21,27% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 126,12%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 4,23 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 3,38.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan kanteknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja T ata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPB yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Untuk memetakan kondisi implementasi e-government secara nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi SPBE di instansi pusat maupun daerah. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi ini berisikan nilai indeks SPBE, nilai indeks domain dan aspek, kekuatan dan kelemahan, rekomendasi serta nilai dari masing-masing indikator yang diharapkan memberi gambaran terhadap penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan pada implementasi kebijakan, tata kelola serta layanan SPBE. Berdasarkan evaluasi KEMENPANRB, indeks SPBE Kabupaten Kudus pada tahun 2023 mencapai nilai sebesar 4,23 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 3,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Indeks SPBE Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

Nama Indeks	Nilai				
	2019	2020	2021	2022	2023
SPBE	2,73	3,08	2,53	3,38	4,23
Domain Kebijakan SPBE	2,53	3,12	2,30	3,90	4,60
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,29	3,43	2,30	3,90	4,60
Domain Tata Kelola SPBE	2,7	2,90	1,90	3,00	4,40
Perencanaan Strategi SPBE	2,14	2,43	1,75	2,75	4,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,5	2,00	2,50	3,50	5,00
Penyelenggara SPBE	2,5	3,00	1,00	2,50	3,00
Domain Manajemen SPBE	2,33	2,33	1,00	2,36	2,73
Penerapan Manajemen SPBE	2,33	2,33	1,00	2,75	3,00
Audit TIK	2,33	2,33	1,00	1,33	2,00
Domain Layanan SPBE	3,09	3,39	3,49	3,82	4,57
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,86	3,43	3,70	3,70	4,50
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,5	3,33	3,17	4,00	4,67

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Kebijakan Internal pada indikator Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus

- Kelemahan

Pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, Kab. Kudus tidak memiliki kelemahan.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Perencanaan Strategis SPBE pada indikator Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya Perencanaan Strategis SPBE Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Rencanan dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus
- Kelemahan
Pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, Kab. Kudus tidak memiliki kelemahan

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada indikator Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Kekuatan
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus
- Kelemahan
Pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kab. Kudus tidak memiliki kelemahan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Penyelenggara SPBE pada indikator Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Penerapan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus
- Kelemahan
Pada aspek Penyelenggara SPBE, Kab. Kudus tidak memiliki kelemahan.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Penerapan Manajemen SPBE pada indikator Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen

Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum terlihat adanya Indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus
- Kelemahan
Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, Kab. Kudus tidak memiliki kelemahan.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Audit TIK pada indikator Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi

SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Audit TIK ini belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus
- Kelemahan
Namun disisi lain, Kab. Kudus masih belum memiliki aturan terkait Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, dimana tidak ditemukan regulasi yang mengatur secara komprehensif berdasar bukti dukung yang disampaikan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada indikator Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan

Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai

- **Kekuatan**
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Kab. Kudus sudah memiliki Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur terkait Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang baru sampai tahap transaksi aplikasi layanan ini bisa dikembangkan ke araha kolaborasi dan integrasi.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Layanan Publik Berbasis Elektronik pada indikator Layanan Pengaduan

Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 3

- **Kekuatan**
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Publik Berbasis Elektronik Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 3 yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus
- **Kelemahan**
Pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, Kab. Kudus tidak memiliki kelemahan

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 104,65% atau Sangat tinggi.

5. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama

Realisasi Sasaran meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Indeks Rasa Aman	Indeks Rasa Aman Penegakan Perda, Penanganan Gangguan Tibumtranmas, Perlindungan Masyarakat dan Damkar dikali 100%
		Indeks Toleransi	Nilai Rata-rata presentase potensi konflik agama, gangguan keamanan dari kelompok radikal dan konflik social yang tertangani

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Toleransi Umat Beragama Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	Indeks rasa aman	161,54	103,77	83,02	162,26	0,53	0,98	184,91	0,53	184,91
2.	Indeks Toleransi	100 %	91,67	91,67	100%	100%	100%	100	100	100
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	130,77	97,72	87,35	131,13			142,45		142,45

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, LKjIP Kantor Kesbangpol Tahun 2022 dan LKjIP Satpl PP Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 142,45%. Angka tersebut melebihi sebesar 11.32% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 131,13%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023

- Indeks Rasa aman $\frac{0,53 - 0,98}{0,53} \times 100\% = 45,92\%$
- Indeks Toleransi $\frac{100 - 100}{100} \times 100\% = 100,00\%$

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indeks rasa aman tahun 2022 sebesar 184,91%. Angka tersebut melebihi sebesar 22,65% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 162,26%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 0,98 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 0,86 mengalami peningkatan sebesar 0,12.

Perhitungan Indeks Rasa Aman Tahun 2023

- Capaian Penegakan Perda = 100%
- Capaian Penanganan Kebakaran = 100%
- Capaian Penanganan Pelanggaran Tibuntrabmas = 92,55%

Indeks rasa aman =

$$\frac{\text{Capaian Penegakan Perda} + \text{Capaian Penanganan Kebakaran} + \text{Capaian Penanganan Pelanggaran Tibuntrabmas}}{3} \\ = \frac{(100\% + 100\% + 92,55\%)}{3} = 0,98$$

Analisis terkait indeks rasa aman

Faktor yang mendukung tidak tercapainya indeks rasa aman :

- Karena kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan bagi masyarakat ekonomi lemah yang berdampak pada terjadinya PHK.
- Berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat cenderung mengambil jalan pintas pada kegiatan-kegiatan informal yang melanggar.

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program yang diprioritaskan pada Pengamanan Perayaan Hari Raya dan Tahun Baru, Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Upaya Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba/Minuman Keras dan Prostitusi, fasilitasi Forkopinda, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Pembinaan kepada Ormas/LSM dan Parpol.

Kinerja di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disamping dengan upaya menurunkan tindak kriminalitas dan konflik di daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, didukung pula dengan adanya upaya perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana, rekrutmen Pol PP sampai pada rasio 72,00 per 10.000 penduduk, terbangunnya desa tangguh bencana sebanyak 21 desa rawan bencana serta penanganan kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah sampai 100%.

Penurunan angka konflik di daerah mempunyai arti yang positif karena menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban daerah semakin kondusif.

Strategi yang dilaksanakan untuk peningkatan kondusifitas keamanan daerah di masa datang adalah:

1. Optimalisasi deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial yang dapat mempengaruhi kestabilan daerah.
 2. Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembaharuan kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara.
 3. Optimalisasi koordinasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gangguan Narkoba (P4GN).
 4. Pemantapan pendidikan politik bagi masyarakat.
- b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Toleransi pada tahun 2023 dapat dipertahankan sebesar 100% sama dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100%.

Pencapaian indeks toleransi tahun 2023 di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh :

1. Prosentase potensi konflik SARA yang tertangani 100%
Pada tahun 2023 terdata ada 5 potensi konflik SARA, kelimanya terkait pendirian rumah ibadah, faktor pendorong tertanganinya adalah adanya kerjasama yang baik dengan tokoh-tokoh agama, umat penghayat dan suku-suku yang ada di Kabupaten Kudus, melalui Forum Kerukunan Umat Beragama, Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan dalam rapat-rapat koordinasi maupun rapat fasilitasi bermasalahan;
2. Ada 3 (tiga) potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang terdata, dan ketiganya juga telah tertangani. Terkait potensi ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung oleh jaringan intelijen baik dari Korem, Kodim, Polres dan Kejaksaan melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
3. Untuk potensi konflik sosial, terdata 22 potensi dari berbagai bidang, penanganan potensi-potensi ini didukung oleh Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKPD) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TTPKS)

Perhitungan Indeks Toleransi :

$$\begin{aligned} \text{Indeks toleransi} &= \frac{\% \text{ potensi konflik sosial} + \% \text{ potensi gangguan keamanan} + \% \text{ konflik sara}}{3} \\ &= \frac{100+100+100}{3} = 100\% \end{aligned}$$

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian Indeks Toleransi di Kabupaten Kudus adalah :

1. Peran aktif lembaga-lembaga kemasyarakatan/ Organisasi Kemasyarakatan baik yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan/inisiatif dari masyarakat untuk membentuk sebuah organisasi yang peduli terhadap toleransi.
Contoh : FKUB, FPBI, MUI, Dewan Gereja Indonesia dll
2. Tersedianya regulasi yang mengatur toleransi umat beragama salah satunya yang mengatur tentang SOP Pendirian Rumah Ibadah.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebebasan beragama dan penganut kepercayaan.
4. Meningkatnya kehadiran pemerintah dalam penyelesaian konflik yang bernuansa SARA melalui sosialisasi dan mediasi-mediasi penyelesaian permasalahan intoleransi.

Program Kegiatan yang mendukung keberhasilan adalah :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 142,45% atau **Sangat Tinggi**.

6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya pendapatan dan	PDRB Perkapita	Jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
	kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk rata-rata pengeluaran perkapita perbulan (dibawah garis kemiskinan) dibagi jumlah penduduk dikali 100%
		Angka Pengangguran	Jumlah angkatan kerjayang tidak memperoleh kesempatan kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	99,59	96,77	94,51	90,11	11.413,19	12.088,00	105,91	11.413,19	105,91
2.	Angka Kemiskinan	99,70	86,67	81,71	82,32	5,90	7,24	77,29	5,90	77,29
3.	Angka Pengangguran	85,49	29,84	80,32	95,02	2,90	3,25	87,93	2,90	87,93
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	94,93	71,09	85,51	89,15			90,38		90,38

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bappeda, Dinsos P3AP2 KB dan Dinas Perinkop UKM Tahun 2022 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 86,99%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,52% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 89,51%.

- PDRB Per Kapita (Juta rupiah) $\frac{138,70}{144,87} \times 100\% = 95,74\%$
- Angka Kemiskinan $\frac{5,90 - (7,41-5,90)}{5,90} \times 100\% = 77,29\%$
- Angka Pengangguran $\frac{2,90 - (3,21-2,90)}{2,90} \times 100\% = 87,93\%$

2) Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU PDRB Per Kapita (juta rupiah) tahun 2023 sebesar 95,74%. Angka tersebut meningkatkan sebesar

5,63% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 90,11%.

Realisasi sebesar 138,70 juta rupiah adalah dari:

PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Angka PDRB perkapita Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 126,95 Juta rupiah diperoleh dari perhitungan jumlah PDRB Kabupaten Kudus menurut harga berlaku sebesar 108.214,90 juta rupiah dibagi oleh jumlah penduduk sebesar 857.415 jiwa.

Faktor yang mendukung keberhasilan PDRB Per Kapita

Pada tahun 2023, jumlah PDRB Kabupaten Kudus mengalami penurunan sebesar -1,98 persen sesuai dengan harga konstan. Sedangkan jika dihitung dengan harga berlaku PDRB Kabupaten Kudus mengalami penurunan sekitar -1,2 persen. Meski demikian tingkat PRDB per Kapita Kabupaten Kudus mengalami kenaikan sebesar 0,57 persen atau sekitar 7 Juta per penduduk. Faktor mempengaruhi tingkat PDRB di Kabupaten Kudus disebabkan oleh adanya perlambatan jumlah penduduk. Selain itu, mulai bergairahnya dunia perekonomian daerah, memberikan angin bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan omzet usaha mereka sehingga diterima oleh pasar dengan Pasar Kudus.

Program yang mendukung untuk meningkatkan PDRB per kapita saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah melakukan banyak hal antara lain:

1. Program peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/ perkebunan
 2. Program peningkatan dan pengembangan pariwisata
 3. Program peningkatan dan pengelolaan pasar
 4. Program kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
 5. Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
 6. Program peningkatan dan pengembangan KUKM
- b. Angka capaian kinerja IKU Angka Kemiskinan tahun 2022 sebesar 77,29%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,03% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 82,32%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 7,24 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 7,41 mengalami kenaikan sebesar 0,17 (angka yang tidak diharapkan).

Untuk mengukur kemiskinan, Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk Tahun 2022 batas garis kemiskinan adalah sebesar 482.806 rupiah ber jiwa.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan angka kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2022 kembali menurun dari kondisi tahun sebesar 7,41 persen menjadi 7,24 persen. Salah satu penyebab terjadi peningkatan jumlah SDIT dan lainnya

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus, Pemerintah Daerah telah berusaha untuk meningkatkan pelatihan dan sekaligus tambah DPRB.

Program yang telah dijalankan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan antara lain :

1. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
3. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial

c. Angka capaian kinerja IKU Angka Pengangguran tahun 2023 sebesar 87,93. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,38 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 89,31%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 3,25 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 3,21 naik sebesar 0,04. Kenaikan angka tersebut dari tahun sebelumnya dikarenakan dikarenakan ada dampak ekonomi global berpengaruh terhadap perusahaan yg berorientasi ekspor sehingga banyak perusahaan yang tidak melakukan penambahan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, jumlah Angkatan kerja Tahun 2023 juga menurun.

Realisasi tahun 2023 sebesar 3,25 adalah dari Perhitungan :

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

$$\begin{aligned}
 \text{TPT} &= \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Anggaran KerJa}} \times 100\% \\
 &= \frac{15.870}{488500} \times 100\% \\
 &= 3,25
 \end{aligned}$$

Faktor yang mempengaruhi angka pengangguran adalah :

- Tidak terserapnya lulusan Perguruan Tinggi karena kurangnya informasi pasar kerja dan kurangnya keterampilan dan kualifikasi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry.
- Dampak ekonomi global berpengaruh terhadap perusahaan yg berorientasi ekspor sehingga banyak perusahaan yang tidak melakukan penambahan tenaga kerja.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran adalah:

- Menyiapkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi di BLK.
 - Link and Match dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga terjadi peningkatan terhadap penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal, informal dan jasa
 - Penyebarluasan informasi lowongan kerja
 - Pembinaan lembaga pelatihan kerja swastapembinaan BKK (Bursa Kerja Khusus) sebagai unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah dan tinggi
 - Memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja pada alumninya.
 - Terjadi Peningkatan terhadap penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal, informal dan jasa;
 - Fasilitasi kemudahan perijinan usaha sehingga banyak tumbuh usaha-usaha baru yang akan menambah lapangan kerja baru
- Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian angka pengangguran adalah :

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja, melalui kegiatan sebagai berikut :
 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota;
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.;
 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten /Kota
- d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus mencapai 65.160 jiwa berkurang sebanyak 900 jiwa dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 66.060 jiwa.

Garis kemiskinan penduduk Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dari 482.806 pada tahun 2022 menjadi 482.806 pada tahun 2023. Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 10 Kabupaten/kota Garis Kemiskinan sedang, yaitu garis kemiskinan di atas garis kemiskinan provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Sedangkan capaian Angka pengangguran pada tahun 2023 sebesar 3,25%.

Permasalahan/penyebab kegagalan

Belum tercapainya target realisasi kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2023 dengan Penurunan angka Kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terhambatnya aktivitas ekonomi pada semua sektor.

Musibah pandemi Covid-19, menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang seperti kegiatan pembatasan mobilitas, pembatasan kegiatan hiburan dan pariwisata, serta penyelenggaraan pendidikan secara daring dari rumah telah menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat baik pada sektor formal maupun informal. Hal ini menyebabkan jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran meningkat.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk kembali meningkatkan capaian kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2023 adalah dengan menekan tingkat penyebaran Covid-19 secara komprehensif dengan pencegahan penularan dan percepatan penanganan penyembuhan pasien Covid19 sehingga Pemerintah daerah dapat membuka kembali pembatasan aktivitas masyarakat pada berbagai sektor dengan norma kehidupan yang baru. Selain itu, untuk menjaga tingkat pendapatan masyarakat tingkat bawah agar tidak semakin turun dan mengurangi jumlah masyarakat miskin, Pemerintah Daerah tetap mempertahankan program bantuan masyarakat langsung untuk masyarakat terdampak covid-19 dan mengembangkan untuk meningkatkan lapangan kerja dan ketrampilan kerja.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Kudus juga melaksanakan program-program perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja,

pembangunan kawasan transmigrasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pendampingan Wira Usaha (PWU) dan penyelenggaraan Job Fair.

Disisi lain juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kudus memiliki peranan yang signifikan dalam rangka ikut memecahkan masalah pengangguran di Kabupaten Kudus.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan. Apabila dibanding dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,57%, Kabupaten Kudus lebih baik yaitu sebesar 2,36% dan di banding Tingkat Nasional sebesar 5,86% Kabupaten Kudus masih tetap lebih baik.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 90,38% atau Tinggi.

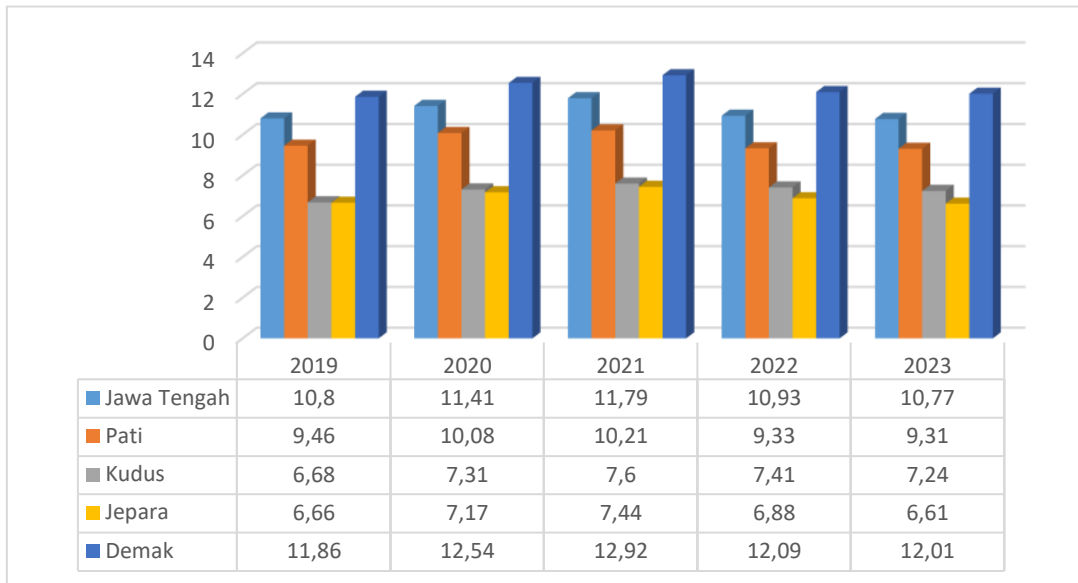
Tabel 2.13
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	58.000	64.240	67.060	66.060	65.160
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,68	7,31	7,60	7,41	7,24
3.	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	406.470	429.666	450.922	482.806	520.830
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,83	1,01	1,23	0,90	0,99
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,18	0,27	0,19	0,22

Sumber : SIPD – BPS Tahun 2023

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus apabila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :

Grafik 2.6.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2019-2023



Sumber : SIPD - BPS Kudus Tahun 2023

7. Meningkatnya daya saing investasi daerah

Realisasi Sasaran meningkatnya daya saing investasi daerah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Nilai Investasi	Investasi tahun $n \times 1.05$ ($n+1$) dalam jutaan rupiah

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	Nilai Investasi	77,25	42,12	472,90	117,18	9,19 T	11,80 T	128,40	9,19 T	128,40
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	77,25	42,12	472,90	117,18			128,40		128,40

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan DPMTSP Tahun 2022 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 128,40%. Angka tersebut meningkat sebesar 11,22% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 117,18%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023

$$1. \text{ Nilai Investasi} \quad \frac{9,19 \text{ T} - 11,80 \text{ T}}{11,80 \text{ T}} \times 100\% = 22,12\%$$

2) Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Nilai Investasi tahun 2023 sebesar 128,40%. Angka tersebut meningkat sebesar 11,22% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 117,18%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 11,80 T apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 10,30 T mengalami peningkatan sebesar 1,5 T

Upaya-upaya yang ditempuh melalui :

- a. Fasilitasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh DPMPSTSP bersinergi dengan Perangkat Daerah Teknis semakin meningkat, dengan pelaksanaan pelayanan terpadu melalui sistem OSS-RBA.
- b. Mengikuti event promosi Central Java Investment Business Forum (CJIBF) dan event promosi lain di luar kota
- c. Menyelenggarakan Sosialisasi dan pendampingan pelaporan LKPM kepada pelaku usaha yang dilakukan di MPP maupun kunjungan ke perusahaan

Hal ini didukung oleh program dan kegiatan dalam anggaran APBD Tahun 2022 yaitu :

- a. Program Promosi Penanaman Modal
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
- d. Program Pengendalian Penanaman Modal
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 128,40% atau Sangat Tinggi

8. Meningkatnya infrastuktur pendukung pengembangan wilayah

Realisasi Sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya Infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Presentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	Presentase jalan, Jembatan, drainase. Irigrasi dalam kondisi mantap dibagi 4

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Daerah Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	101,26	103,06	102,30	102,59	83,73	85,43	102,03	83,73%	102,03
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	101,26	103,06	102,30	102,59			102,03		102,03

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan LKJIP Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 102,03%. Angka tersebut turun sebesar 0,56% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 102,59%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023

$$1. \text{ Persentase (\%)} \text{ infrastruktur dalam kondisi mantap} \quad \frac{83,73-85,43}{85,43} \times 100\% = 1,99\%$$

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap tahun 2023 sebesar 102,03%. Angka tersebut penurunan sebesar 0,56% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 102,59%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 85,43 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 84,86

Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap Tahun 2023 di Kabupaten Kudus tercapai sebesar 85,43% dipengaruhi oleh :

- Prosentase Jalan dalam kondisi mantap	94,69%
- Prosentase Jembatan dalam kondisi mantap dan sedang	91,29%
- Prosentase Luas Irigasi dalam kondisi baik	65,45%
- Prosentase Panjang saluran Drainase perkotaan dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat	90,28%
Jumlah	341,71%

Realisasi Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap adalah:

$$341,71\% : 4 = 85,43\%$$

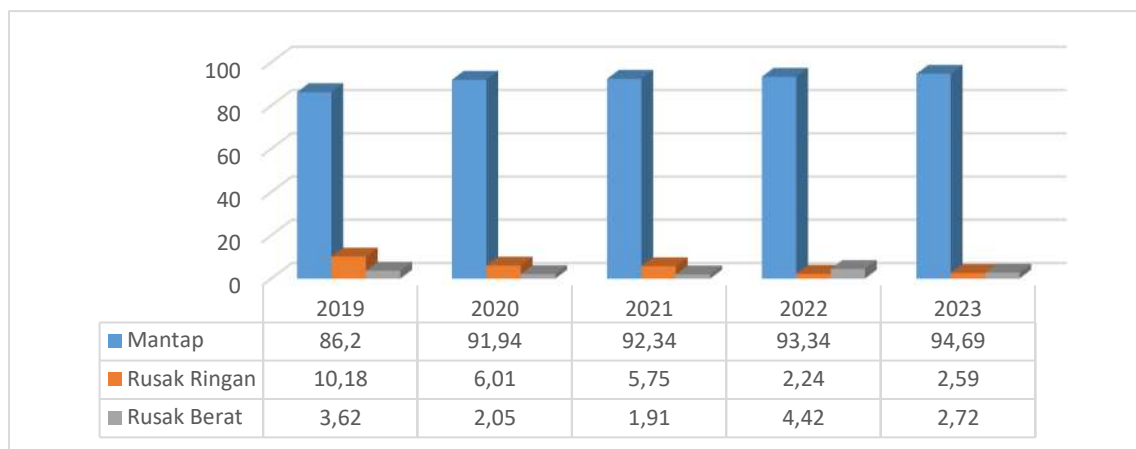
Berikut ini adalah sarana dan prasarana Jalan di Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 2.16
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kudus
Berdasarkan Kondisi Tahun 2019-2023

No.	Kondisi Jalan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Mantap	86,20	91,94	92,34	93,34	94,69
2	Rusak ringan	10,18	6,01	5,75	2,24	2,59
3	Rusak berat	3,62	2,05	1,91	4,42	2,72

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Grafik 2.7.
Panjang Jalan Menurut Kondisi Di Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2023



Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Di Kabupaten Kudus terdapat tiga penggolongan status jalan dimana masing-masing dikelola secara terpisah. Ketiganya adalah jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten dengan panjang 639.261,70 km. Jalan Negara yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur pantura atau disebut juga jalan Daendels, yang membelah Kabupaten Kudus sepanjang 21.180 km atau 3,44 persen dari total panjang jalan. Kemudian jalan Provinsi sepanjang 54.939 km atau 7,20 persen dan ketiga jalan Kabupaten sepanjang 639.261,7 km atau 89,36 persen.

Berikut ini adalah sarana dan prasarana Jembatan Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 2.17
Jumlah dan Kondisi Jembatan Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2023

NO.	KONDISI JEMBATAN	SATUAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Baik	unit	208	312	312	181	185
		%	58,43	87,64	87,64	42,59	43,53
2.	Sedang	unit	106	9	9	206	203
		%	29,78	2,53	2,53	48,47	47,76
3.	Rusak	unit	42	35	35	38	37
		%	11,80	9,83	9,83	8,94	8,71
<i>JUMLAH</i>		<i>unit</i>	356	356	356	425	425

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Keberadaan sarana dan prasarana irigasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kudus, terutama untuk menunjang peningkatan produksi pertanian, penyediaan air bersih di kawasan permukiman, industri, pariwisata, dan sebagainya.

Daerah irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus
Tahun 2019 – 2023

NO	KONDISI DAERAH IRIGASI	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	Ha	8.882,90	9.022,40	9.049,40	9.268,40	9.294,00
		%	86,28	87,64	87,90	90,02	90,28
2	Rusak Ringan	Ha	799,00	799,00	513,00	640,00	637,00
		%	7,76	7,76	4,98	6,22	6,19
3	Rusak Sedang	Ha	513,00	513,00	733,00	387,00	363,50
		%	4,98	4,98	7,12	3,76	3,53
4	Rusak Berat	Ha	100,50		-	-	-
		%	0,98		-	-	-
	Jumlah Total	Ha	10.295,40	10.434,78	10.295,40	10.295,40	10.295,40
	Jumlah Pembulatan	Ha	10.295	10.435	10.295	10.295	10.295
		%	100		100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Saluran drainase tahun 2018 ada Perubahan Data base Drainase menyesuaikan SK Jalan Kabupaten dengan Panjang saluran 584.280 meter dengan kondisi baik, saluran drainase Tahun 2018 sebanyak 243.349 meter dengan kondisi sedang 108.557 meter, sedangkan kondisi rusak sebanyak 232.374 meter. Untuk Tahun 2022 Paniaang Saluran Drainase ada perubahan yaitu menjadi 592.692,25 meter dengan kondisi baik 44,28 % (262.437,75 m), Kondisi sedang 20,72% (122.810,00 m) sedangkan kondisi rusak 35,00% (207.444,50 m). Prosentase Drainase Kondisi mantap tahun 2021 adalah sebesar 64,00 % sedangkan Tahun 2022 adalah sebesar 65,00 % persentase ada peningkatan.

Tabel 2.19
Kondisi Saluran Drainase Di Kabupaten Kudus
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,23	63,03	64,00	65,00	65,45

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah:

1. Upaya penanganan Kondisi Infrastruktur rusak ringan dan berat melalui penggantian dan pemeliharaan Infrastruktur di Kabupaten Kudus
2. Penyusunan perencanaan rehabilitasi infrastruktur untuk tahun yang akan datang sesuai dengan skala prioritas.
3. Koordinasi lintas sektor terkait dengan pemanfaatan infrastruktur yang berdampak pada beban dan kapasitas yang dapat berdampak pada kerusakan infrastruktur.

Program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya insfratraktur:

1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didukung oleh Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
2. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

3. Penyelenggaraan Jalan didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan Jembatan dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi Jembatan

Kinerja Urusan pekerjaan Umum lainnya dapat dilihat melalui cakupan air minum perkotaan dan perdesaan serta sanitasi. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi sampai tahun 2023 adalah sebesar 98,68 % untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi.

Tabel 2.20
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase penduduk berakses air minum	95,37	97,03	98,00	98,25	98,68
2	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus tahun 2022-2024. RTRW Kabupaten Kudus baru saja ditetapkan pada tahun 2022, sehingga capaian pelaksanaan penataan ruang sebelumnya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kudus Kinerja Penataan ruang yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Kudus sampai pada 2021 telah tersusun 6 (enam) RDTR Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) RDTR Kawasan Strategis Kabupaten. Selain penyusunan rencana rinci, pada tahun 2017 hingga tahun 2022 telah dilaksanakan Revisi Dokumen RTRW Kabupaten Kudus. Cakupan pelayanan ketaatan penataan ruang di Kabupaten Kudus selalu 100% setiap tahunnya.

Hasil cakupan penataan ruang Kabupaten Kudus konstan dari tahun ke tahun sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.21
Cakupan Pelayanan Penataan Ruang Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang	100	100	100	100	98,60

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sedangkan Urusan pertanahan dan penataan Ruang Kabupaten Kudus bekerja sama dengan BPN Kabupaten Kudus. Capaian persentase luas taah bersertikat di tahun 2021 yaitu 80,00 % sedangkan target di tahun 2022 persentase luas tanah bersertikat 73,19 % capaian 80,78 % target terlampaui sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22
Database Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)
Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Wilayah daratan Kabupaten Kudus	ha	42.515,64	42.515,70	42.516,00	42.516,00	42.516,00
2	Luas tanah Bersertipikat HGB	ha	776,22	740,5199	714,00	750	702,440
3	Persentase luas tanah Bersertipikat HGB	ha	1,83	1,74	2,00	2,20	1,65
4	Luas tanah Bersertipikat HP	ha	2.296,87	3.606,9167	5.417,00	5.610,00	5.919,427
5	Persentase luas tanah Bersertipikat HP	ha	5,40	8,48	13,00	16,33	13,92
6	Luas tanah Bersertipikat HM	ha	28.662,38	27.401,2264	27.812,00	27.914,00	27.735,655
7	Persentase luas tanah Bersertipikat HM	ha	67,42	64,45	65,00	81,28	65,24
8	Luas tanah Bersertipikat HW	ha	41,82	62,0062	84,00	70	106,536
9	Persentase luas tanah Bersertipikat HW	ha	0,10	0,15	0,2	0,20	0,25
10	Total Luas tanah Bersertipikat	ha	31.777,29	31.810,6697	34.027	34.344,00	34.483
11	Persentase luas tanah Bersertipikat	ha	74,74	74,80	80,00	80,78	81,11

Sumber data : BPN Kabupaten Kudus, Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Faktor pendorong dari naiknya indeks kualitas Pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan daerah ini dilaksanakan melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
5. Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
6. Program Penataan Bangunan Gedung.
7. Program Penyelenggaraan Jalan.
8. Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
10. Program Penatagunaan Tanah.
11. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun permasalahan pada peningkatan infrastruktur pendukung pengembangan daerah adalah :

1. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan serta sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/profesionalismenya.
2. Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/profesionalismenya.
3. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran irigasi sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak (tidak tahan lama).
4. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi kekuatan kelas jalan, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang cukup banyak dan diperlukan dana yang cukup besar untuk memperbaikinya.

Strategi untuk peningkatan insfrastruktur dalam kondisi mantap yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi Jawa Tengah untuk mendukung dana pembangunan di Kabupaten Kudus, baik itu melalui Dana Alokasi Khusus

(DAK) Dana Bantuan Keuangan Provinsi maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparat pelaksanaan (sumber daya manusia agar lebih professional, diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, dan lain-lain.
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun, sehingga tidak mudah rusak.

Solusi :

Adapun solusi dari permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang masih perlu penanganan diusulkan pada tahun berikutnya.
2. Perlunya pendekatan persuasif yang lebih intensif kepada masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 102,03% atau Sangat tinggi

9.Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan

Realisasi Sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Rata-rata indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan lahan dibagi 3

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101,22	100,84	96,05	82,45	67,77	60,80	89,72	67,77	89,72
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	101,22	100,84	96,05	82,45			89,72		89,72

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan LKjIP Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran Strategis sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 89,72%. Angka tersebut meningkat sebesar 7,27% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 82,45%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023

$$1. \text{ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)} \quad \frac{67,77 - 60,80}{60,80} \times 100\% = -11,46\%$$

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023 sebesar 89,72%. Angka tersebut meningkat sebesar 7,27% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 82,45%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 60,80 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 54,88 mengalami peningkatan sebesar 5,92 dan angka tersebut sama dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 89,72%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2023 dipengaruhi oleh :

1. Indeks Kualitas Air dengan nilai 47,00 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 37,60%
2. Indeks Kualitas Udara dengan nilai 79,47 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 40,50%
3. Indeks Tutupan Lahan dengan nilai 58,90 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 21,90%

Sehingga dari faktor diatas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Indeks	Nilai	Bobot	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Air	52,67	37,60%	19,80%
2.	Indeks Kualitas Udara	81,92	40,50%	33,18%
3.	Indeks Tutupan Lahan	35,72	21,90%	7,82%

Dengan rumus sebagai berikut :

$$(Bobot \times IKA) + (Bobot \times IKU) + (Bobot \times ITL) = \text{Realisasi}$$
$$(37,60\% \times 52,67) + (40,50\% \times 81,92) + (21,90\% \times 35,72) = 60,80$$

Faktor yang tidak mempengaruhi IKLH tidak memenuhi target karena yang mana pada penentuan target 2023 mengacu pada target RPJMD 2018-2023 dimana IKLH 2023 perhitungannya berpedoman pada Permen LHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK, sedangkan pada realisasi 2023 perhitungan IKLH berpedoman pada PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yg mulai berlaku tgl 19 Desember 2021 yang sangat berbeda dalam perhitungan IKLH.

Upaya dan usaha untuk meningkatkan capaian IKLH :

A. Indeks Kualitas Air

1. Perlu upaya pemisahan saluran pembuangan air hujan dengan limbah domestik skala kabupaten dengan pembangunan IPAL komunal terpusat agar tidak ada limbah domestik yang masuk ke air sungai (Kewenangan Dinas PUPR)
2. Perlunya pembangunan IPAL komunal pada kawasan permukiman (Kewenangan Dinas PUPR)
3. Perlunya sosialisasi dan pembinaan ke semua pelaku usaha terutama skala UMKM untuk mempunyai IPAL dalam pengelolaan air limbah industri dan domestik. (Kewenangan Dinas Nakerinkop dan UKM dan Dinas PKPLH)
4. Perlunya fasilitasi pembangunan Instalasi pengolahan air limbah pada industri skala UMKM (Kewenangan Dinas Nakerinkop dan UKM atau Pemerintah Desa)
5. Perlunya perbaikan kondisi vegetasi pada daerah hulu sungai dan daerah sempadan sungai (Kewenangan BPDAS-KLHK).
6. Perlunya sosialisasi kepada petani baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir dalam penggunaan pupuk kimia, agar tidak mencemari air sungai (Kewenangan Dinas Pertanian)
7. Perlunya pengawasan intensif pada kualitas air limbah yang dibuang oleh pelaku usaha ke sungai sebagai badan air penerima (Kewenangan Dinas PKPLH)
8. Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan pada seluruh Daerah Aliran Sungai (Kewenangan Dinas Kesehatan)

9. Perlunya penguangan eco enzym pada air sungai secara berkala (Kewenangan Dinas PKPLH)
10. Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat pada Daerah Aliran Sungai agar tidak membuang sampah pada sungai (Dinas PKPLH, Pemdes, Dinas PMD, BBWS Pemali Juwana)
11. Perlunya memperbanyak jumlah titik sampling uji kualitas air permukaan dan air sungai (Kewenangan Dinas PKPLH)
12. Perlunya mewujudkan laboratorium lingkungan yang telah ada agar terakreditasi dan teregister di KLHK (Kewenangan Dinas PKPLH)

B. Indeks Kualitas Udara

1. Perlunya memperbanyak penghijauan turus jalan, (Kewenangan Dinas PKPLH)
2. Perlunya penambahan ruang terbuka hijau (Kewenangan Dinas PKPLH, Pemdes)
3. Perlu adanya kawasan bebas rokok (Kewenangan Dinas Kesehatan)
4. Perlunya memperbanyak jalur sepeda (Kewenangan Dinas Perhubungan)
5. Perlunya pengintensifan pengawasan dan pembinaan pada pelaku usaha penghasil emisi udara (Kewenangan Dinas PKPLH)
6. Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha sektor industri penghasil emisi udara terutama skala UMKM untuk mengelola sesuai ketentuan yang berlaku (Dinas Nakerinkop dan UKM)
7. memperbanyak jumlah titik sampling uji kualitas udara di Kabupaten Kudus (Kewenangan Dinas PKPLH)

C. Indeks Kualitas Lahan

1. Perlunya penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus (Kewenangan Dinas PKPLH, Pemdes)
2. Perlunya koordinasi ke perusahaan/swasta/masyarakat untuk berperan serta menyediakan RTH publik dalam bentuk perjanjian atau kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
3. Perlunya koordinasi ke Kementerian LHK terkait approve tutupan lahan.

Analisa /Faktor pendukung keberhasilan
 Dari capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 sebesar 89,72% diatas, sebagaimana formula penghitungan, pencapaian IKU IKLH dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.24
 Capaian Indikator IKA, IKU dan IKTL Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023			% Capaian Tahun 2020	% Capaian Tahun 2021	Target akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian				
1	Indeks Kualitas Air	50,85	52,67	103,58%	100,02%	97,07%	86,03%	103,58%
2	Indeks Kualitas Udara	93,92	81,92	87,22%	100,07%	86,86%	84,78%	87,22%
3	Indeks Tutupan Lahan	60,85	35,72	58,70%	102,27%	99,67%	40,37%	58,70%

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Kudus

Tabel 3.22
 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
 Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air (IKA)	46	46	47,22	47	43,75	52,67
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,07	89,07	90,34	79,47	79,63	81,92
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	50	58,08	58,51	58,9	28,22	35,72
IKLH	60,52	63,69	64,67	62,76	54,88	60,80

Indeks kualitas air

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2018-2023 mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif, dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 64,67, selanjutnya mengalami penurunan dengan capaian paling rendah pada tahun 2022 sebesar 54,88.

Pada tahun 2023 indeks kualitas lingkungan hidup mengalami perbaikan dengan naik sebesar 60,80. Hal ini diikuti komponen IKA, IKU dan IKL yang juga berfluktuasi capaiannya, dimana pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dan tahun 2021-2022 secara umum menurun, sedangkan pada tahun 2023 capaian ketiga komponen penyusun IKLH mengalami kenaikan, dimana khusus IKA mengalami capaian tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 52,67.

Permasalahan :

Dengan adanya Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, terhadap baku mutu referensi yang tidak sama dengan baku mutu kualitas ambien, sehingga perhitungan menggunakan baku mutu referensi yaitu angka 40 untuk NO₂ dan angka 20 untuk SO₂.

Solusi

Perlunya sosialisasi kepada pemilik persetujuan dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengawasi lebih ketat lagi terhadap ambang batas NO₂ dan SO₂.

Efektifitas dan Efisiensi

Dari uraian program dan kegiatan diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dikatakan efektif dan efisien, karena program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dalam mencapai sasaran tersebut dan anggaran yang digunakan juga lebih sedikit dari target pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 89,72% atau kategori tinggi.

Dalam rangka untuk mencapai 9 sasaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 2.612.456.474.406,- untuk 124 program. Realisasi Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2023 untuk mendukung 20 IKU sebesar Rp. 2.381.965.814.078,-

Hasil Analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan Lama Sekolah • Rata-rata lama sekolah • Persentase (%) akses dan mutu pendidikan 	Pengelolaan Pendidikan	63,93%	63,93%	187.977.135.475	178.194.496.915	94,80 %	5,20 %
			Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	96,96%	96,96%	956.679.580	924.029.694	96,59 %	9,94 %
			Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	92,00%	92,00%	16.884.445.589	16.837.365.588	99,72 %	0,28 %
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,00%	100,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00 %	0,00 %
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Hidup • Angka Kematian Ibu • Angka Kematian Bayi 	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100,00%	100,00%	91.779.943.318	83.130.064.048	90,58 %	8,31 %
			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	92,00%	92,00%	1.084.895.700	1.024.756.200	94,46 %	5,54 %
			Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	92,00%	92,00%	642.126.010	454.710.050	70,81 %	29,19 %
			Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00%	100,00%	1.426.072.000	1.180.143.710	82,75 %	17,25 %
			Pemberdayaan Sosial	85,00%	85,00%	240.971.500	219.186.587	90,96 %	9,04 %
			Rehabilitasi Sosial	100,00%	100,00%	2.313.972.420	2.099.116.240	90,71 %	3,85 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	75,00%	75,00%	69.879.943.985	68.102.753.719	97,46 %	7,38 %
			Penangan bencana	100,00%	100,00%	219.687.730	160.289.500	72,96 %	27,04 %
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100,00%	100,00%	18.000.000	7.363.850	40,91 %	59,09 %
			Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	29,00%	29,00%	180.610.688	131.850.800	73,00 %	27,00 %
			Perlindungan perempuan	100,00%	100,00%	26.996.849	16.134.900	59,77 %	0,23 %
			Pengelolaan sistem data gender dan anak	89,00%	89,00%	7.499.850	4.207.000	56,09 %	44,38 %
			Pemenuhan Hak Anak (PHA)	3,00 Peringkat	3,00 Peringkat	407.497.360	328.728.210	80,67 %	47,34 %
			Perlindungan khusus anak	100,00%	100,00%	34.499.730	19.999.199	57,97 %	42,03 %
			Pengendalian penduduk	1,00%	1,00%	288.935.740	122.081.540	42,25 %	30,24 %
			Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	72,00%	72,00%	3.088.838.200	2.255.306.305	73,01 %	27,30 %
			Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	14,50%	14,50%	4.561.400.000	4.374.487.805	95,90 %	49,28 %
3.	Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat	• Kemampuan konsumsi rumahtangga perkapita (ribu rupiah/org/th)	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100,00%	100,00%	12.499.605	8.760.000	70,08 %	29,92 %
			Peningkatan difersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100,00%	100,00%	354.999.340	339.889.400	95,74 %	9,98 %
			Penanganan kerawanan pangan	100,00%	100,00%	49.999.376	45.077.700	90,16 %	9,84 %
			Pengawasan Keamanan Pangan	90,00%	90,00%	34.996.865	30.594.670	87,42 %	18,13 %
			Pengelolaan Perikanan Budidaya	100,00%	100,00%	149.999.270	145.568.339	97,05 %	3,25 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100,00%	100,00%	44.999.810	33.384.300	74,19 %	25,86 %
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100,00%	100,00%	9.999.900	9.999.900	100,00 %	-3,88 %
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00%	100,00%	12.594.583.760	12.462.736.054	98,95 %	2,23 %
			Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00%	100,00%	544.744.580	534.699.000	98,16 %	12,29 %
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100,00%	100,00%	194.000.000	180.556.640	93,07 %	9,30 %
			Penyuluhan Pertanian	100,00%	100,00%	128.499.750	116.917.600	90,99 %	10,20 %
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Reformasi Birokrasi • Nilai Akutabilitas Kinerja • Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) 	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90 Nilai	71,36 Nilai				
				83 Nilai	72,05 Nilai				
				WTP	WTP				
		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Indek Kepuasan Masyarakat 		2,87 Indeks	4,23 Indeks				
				85,00 Indeks	89,33 Indeks				
			Pendaftaran penduduk	100,00%	100,00%	2.779.538.260	2.656.033.826	95,56 %	4,10 %
			Pelayanan pencatatan sipil	100,00%	100,00%	782.089.028	771.785.398	98,68 %	1,28 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	100,00%	100,00%	815.575.750	798.216.644	97,87 %	2,13 %
			Pengembangan Kebudayaan	62,00%	62,00%	3.834.967.160	3.627.695.540	94,60 %	4,43 %
			Program Pembinaan Sejarah	1,00 tema	1,00 tema	6.068.150	6.062.300	99,90 %	0,10 %
			Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	20,00%	20,00%	105.667.633	105.652.400	99,99 %	2,90 %
			Pengelolaan Permuseuman	100,00%	100,00%	2.527.981.578	2.501.001.290	98,93 %	1,07 %
			Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	10,00%	10,00%	2.392.248.725	2.319.733.322	96,97 %	3,03 %
			Pemasaran Pariwisata	14,00%	14,00%	2.613.112.075	2.541.879.157	97,27 %	1,49 %
			Pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi kreatif	2,00%	2,00%	395.000.000	333.660.700	84,47 %	15,53 %
			Penataan desa	123 desa	123 desa	6.462.244.900	6.268.898.631	97,01 %	6,37 %
			Peningkatan kerjasama desa	2,00 produk hukum kawasan perdesaan	2,00 produk hukum kawasan perdesaan	99.999.960	98.158.000	98,16 %	4,81 %
			Administrasi pemerintahan desa	15,00%	15,00%	3.698.663.450	3.359.177.727	90,82 %	7,49 %
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	100,00%	100,00%	604.989.230	574.295.481	94,93 %	5,07 %
			Kepegawaian Daerah	100,00%	100,00%	4.561.224.486	3.672.066.735	80,51 %	20,64 %
			Pengembangan sumber daya manusia	8,08%	8,08%	1.690.717.000	1.471.828.805	87,05 %	2,73 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100,00%	100,00%	2.880.133.635	2.379.401.962	82,61 %	17,39 %
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100,00%	100,00%	686.521.000	584.130.549	85,09 %	14,91 %
			Penelitian dan pengembangan daerah	100,00%	100,00%	831.600.000	494.075.113	59,41 %	40,59 %
			Pengelolaan keuangan daerah	100,00%	100,00%	287.340.987.313	284.195.201.415	98,91 %	-0,11 %
			Pengelolaan barang milik daerah	90,00%	90,00%	6.768.711.714	5.385.365.757	79,56 %	31,54 %
			Pengelolaan pendapatan daerah	100,00%	100,00%	1.887.666.495	1.769.801.715	93,76 %	12,23 %
			Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100,00%	100,00%	39.033.526.000	23.961.877.857	61,39 %	28,61 %
			Penyelenggaraan pengawasan	76,00%	76,00%	429.349.240	322.851.180	75,20 %	24,80 %
			Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	50,00%	50,00%	693.266.750	576.907.583	83,22 %	16,78 %
			Informasi dan komunikasi publik	100,00%	100,00%	11.545.474.358	11.375.357.937	98,53 %	1,47 %
			Aplikasi informaiika	2,75 indeks	2,75 indeks	2.153.691.545	1.955.764.720	90,81 %	5,32 %
			Penyelenggaraan statistik sektoral	100,00%	100,00%	136.036.000	97.469.310	71,65 %	28,35 %
			Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	24,00%	24,00%	52.033.010	32.829.667	63,09 %	36,91 %
			Penanggulangan Bencana	100,00%	100,00%	1.957.799.595	1.830.346.097	93,49 %	6,51 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
5.	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Serta Toleransi Umat Beragama	• Indeks Rasa Aman	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	85,00%	85,00%	3.718.789.880	3.196.501.754	85,96 %	22,75 %
			Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	86,00%	86,00%	950.152.000	935.090.646	98,41 %	34,87 %
		• Indeks Toleransi	Penguatan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	100,00%	100,00%	2.719.576.780	2.495.816.085	91,77 %	8,23 %
			Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta kebudayaan politik	100,00%	100,00%	20.981.523.500	20.757.872.398	98,93 %	1,07 %
			Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100,00%	100,00%	247.138.930	225.356.000	91,19 %	8,81 %
			Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100,00%	100,00%	436.464.243	413.860.328	94,82 %	5,18 %
			Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100,00%	100,00%	431.802.240	421.312.500	97,57 %	2,43 %
6.	Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	• PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	95,00%	95,00%	6.534.741.100	6.488.078.380	99,29 %	32,64 %
		• Angka Kemiskinan	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100,00%	100,00%	246.575.894	222.264.900	90,14 %	4,86 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
		• Angka Pengangguran	Pengembangan ekspor	1.657.570.000.000	1.657.570.000.000	273.788.295	107.275.223	39,18 %	28,70 %
			Standarisasi dan perlindungan konsumen	95,00%	95,00%	71.421.830	45.470.700	63,66 %	32,65 %
			Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	70,00%	70,00%	326.432.000	311.284.994	95,36 %	4,64 %
			Perencanaan tenaga kerja	2,00%	2,00%	9.883.200	9.700.800	98,15 %	1,85 %
			Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	85,00%	85,00%	8.063.709.110	6.114.288.677	75,82 %	27,35 %
			Penempatan tenaga kerja	50,00%	50,00%	49.901.120	47.123.660	94,43 %	20,77 %
			Hubungan industrial	100,00%	100,00%	59.357.847	57.294.350	96,52 %	3,48 %
			Pendidikan dan latihan perkoperasian	89,00%	89,00%	226.940.340	215.338.000	94,89 %	5,28 %
			Pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	4,00%	4,00%	2.815.559.007	2.761.480.160	98,08 %	9,67 %
			Pengembangan UMKM	6,00%	6,00%	789.971.765	638.023.896	80,77 %	19,73 %
			Perencanaan dan pembangunan industri	0,40%	0,40%	28.288.338.235	24.556.656.547	86,81 %	20,69 %
			Pembangunan kawasan transmigrasi	25,00%	25,00%	2.999.000	2.999.000	100,00 %	0,00 %
7.	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	• Nilai Investasi	Pengembangan iklim penanaman modal	100,00%	100,00%	63.449.475	57.599.430	90,78 %	9,22 %
			Promosi penanaman modal	10,00%	10,00%	152.448.765	143.448.090	94,10 %	2,07 %
			Pelayanan penanaman modal	60,00%	60,00%	137.678.982	128.514.900	93,34 %	52,49 %
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	3,50 Trilyun	3,50 Trilyun	368.868.800	281.422.656	76,29 %	27,97 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100,00%	100,00%	84.541.170	81.897.715	96,87 %	3,13 %
			Pengelolaan energi baru terbarukan	100,00%	100,00%	1.950.000	1.480.000	75,90 %	24,10 %
8.	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Wilayah	• Persentase (%) Insfrastruktur Dalam Kondisi Mantap	Pengelolaan sumber daya air (SDA)	85,00%	85,00%	9.536.723.000	8.762.439.377	96,25%	3,75%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	100,00%	100,00%	6.262.636.000	6.130.079.000	82,13%	17,87%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100,00%	100,00%	1.109.843.000	1.061.862.000	95,68 %	4,32 %
			Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	66,00%	66,00%	12.811.230.875	12.508.710.060	97,64 %	1,53 %
			Penataan bangunan gedung	60,00%	60,00%	2.079.308.165	1.916.681.450	92,18 %	0,51 %
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	60,00%	60,00%	36.801.360	600.000	1,63 %	98,37 %
			Penyelenggaraan jalan	89,00%	89,00%	142.303.662.032	140.167.702.402	98,50 %	4,67 %
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	50,00%	50,00%	81.130.100	20.248.000	24,96 %	75,04 %
			Penyelenggaraan penataan ruang	100,00%	100,00%	550.000.000	474.494.622	86,27 %	12,33 %
			Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	74,84%	74,84%	190.000.000	111.621.500	58,75 %	41,47 %
			Penatagunaan tanah	100,00%	100,00%	359.998.650	230.856.800	64,13 %	10,87 %
			Penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan jalan	90,00%	90,00%	50.008.653.429	48.257.254.754	96,50 %	3,50 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
9.	Meningkatnya Kesimbangan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pengembangan perumahan	98,30%	98,30%	1.613.979.625	1.551.583.028	96,13 %	3,57 %
			Kawasan permukiman	0,02%	0,02%	547.628.850	435.486.250	79,52 %	20,48 %
			Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	99,14%	99,14%	3.051.712.000	2.919.472.384	95,67 %	1,57 %
			Perencanaan Lingkungan Hidup	100,00%	100,00%	506.998.854	492.513.150	97,14 %	2,86 %
			Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	67,77%	67,77%	240.631.750	235.612.603	97,91 %	10,07 %
			Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	8,20%	8,20%	6.393.898.980	6.181.509.053	96,68 %	21,73 %
			Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	48,48%	48,48%	4.999.632	2.463.192	49,27 %	117,34 %
			Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	50,00%	50,00%	22.500.000	19.134.700	85,04 %	15,28 %
			Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	25,00%	25,00%	37.900.000	37.573.550	99,14 %	1,77 %
			Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	50,00%	50,00%	257.825.000	254.250.692	98,61 %	10,03 %
Penanganan pengaduan lingkungan hidup	100,00%	100,00%	4.275.000	4.244.350	99,28 %	0,72 %			

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan persampahan	72,00%	72,00%	7.076.376.000	6.963.909.147	98,41 %	16,95 %
			Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	0,48%	0,48%	15.000.000	15.000.000	100,00 %	2,76 %
			JUMLAH			2.612.456.474.406	2.381.965.814.078	91,18%	8,82%

Efisiensi penggunaan anggaran dapat kita lihat dengan memperbandingan capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran, Tahun 2023 Realisasi Anggaran sebesar 91,18%, dengan demikian maka katagori pelaksanaan anggaran adalah Efisien sebesar 8,82%. Dimana Capaian Kinerja sasaran rata-rata mencapai diatas Realisasi anggaran.

Secara umum Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kinerjanya dikategorikan Sangat tinggi (nilai 91% < 100%), Tinggi (nilai 76% < 90%), Sedang (nilai 66% < 75%), Rendah (nilai 51% < 65%) dan Sangat Rendang (nilai < 50%), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sesuai dengan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 9 sasaran strategis dimaksud, capaian kinerja dalam kategori sangat tinggi sebanyak 6 sasaran dan dalam kategori tinggi sebanyak 3 sasaran.





Berkaitan hal tersebut, berikut ini disampaikan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.26
Ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	97,74%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	76,86 %	Tinggi
3.	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	105,91 %	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	104,65%	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	145,45%	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	86,99%	Tinggi
7.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	128,40%	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	102,03%	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	89,72%	Tinggi

PENGHARGAAN YANG DIRAIH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO / PIAGAM
1.	28 Feb 2023	Penghargaan Adipura 2022	Kementerian LH dan Kehutanan	
2.	14 Maret 2023	Penghargaan UHC (Universal Health Coverage)	Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri	
3.	19 Mei 2023	Opini WTP ke 11	BPK RI	
4.	29 Mei 2023	Anugerah Belajar merdeka kategori Pemda Trnasformatif subkategori Indonesia Pintar	Kemenristek	

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO / PIAGAM
5	16 Juni 2023	Penghargaan hasil survey Ber Akhak tahun 2022 dengan indeks implementasi "Berorientasi Pelayanan"	ACT Consulting Internasional bekerjasama dengan KemenPAN RB	 BUPATI KUDUS TERIMA PENGHARGAAN BERORIENTASI PELAYANAN
6.	6 Oktober 2023	Penghargaan Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Bejaan Tahun 2023 sebesar 7,37 M	Pemerintah Pusat	 KOMITMEN TANGANI STUNTING, PEMKAB KUDUS RAHI PENGHARGAAN DARI WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
7.	26 Oktober 2023	Penghargaan BKN Award kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Inforasi dan Sistem Computer Assisted Test (CAT)	BKN	 SUKSES KELOLA MANAJEMEN ASN, KUDUS SAREY BEN AWARD 2023
8.	06 November 2023	Piagam Bhumandala Award	Badan Informasi Geospasial	 P2 BUPATI KUDUS TERIMA PENGHARGAAN BHUMANDALA AWARD 2023